



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Bappeda Kaltim 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75123
Telepon/Fax: (0541) – 742283
website: bappeda.kaltimprov.go.id email: bappeda@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000.9.6.3/ 283 /B.Um-Bapp/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BAPPEDA PROVINSI KALTIM TAHUN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah RI Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diharuskan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana laporan kinerja dimaksud adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2023 di lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud serta tugas di atas, maka dipandang perlu membentuk tim pengarah, pelaksana dan sekretariat yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan mereka yang nama/jabatannya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023;
11. Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023
12. Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan personil seperti yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah bertugas sebagai koordinator penyusunan substansi sektoral LKjIP, Tim Pelaksana bertugas sebagai penyiapan bahan penyusunan LkjIP dan Tim Sekretariat bertugas sebagai pengumpulan bahan serta penyusunan LKjIP;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun wajib berpedoman pada peraturan dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan melalui DPA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : Januari 2024



Kepala,

Yusliando

NIP. 19671005 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 1:

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALTIM NO: 000.9.6.3/283 /B.Um-Bapp/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENGARAH, PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

I. TIM PENGARAH

Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

II. TIM PELAKSANA

Ketua : Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Anggota : 1. Seluruh Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim
2. Kasubbag Umum Bappeda Prov. Kaltim

II. SEKRETARIAT

Koordinator : Kasubbag Perencanaan Program Bappeda Prov. Kaltim
Anggota : 1. Kartinem
2. Hendro
3. Rusman
4. Muhammad Riyan Alwin
5. Tony Kurniawan Shidiq
6. Wirayudha Nugraha
7. Andi Muhammad Azmi Maulana

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :



Kepala,

Yusliando

NIP. 19671005 199803 1 009



KATA PENGANTAR

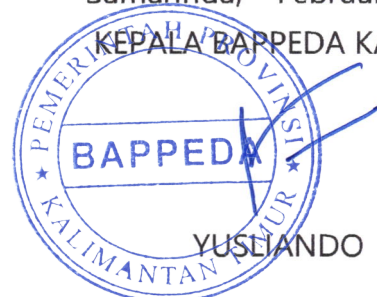
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dapat menuntaskan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2023. Laporan ini merupakan kewajiban instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan upaya peningkatan kinerja dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Penyusunan LkjIP berpedoman pada beberapa peraturan perundangan, diantaranya pada Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki pandangan bahwa perbaikan secara terus menerus (continuous improvement) harus dilakukan secara konsisten. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, evaluasi merupakan titik di mana organisasi dapat melihat kekuatan, progress yang telah diperoleh, serta aspek-aspek yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini merupakan agenda penting yang akan menjadi dasar perbaikan kinerja organisasi kedepan, terutama terkait tugas-tugas strategis sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis organisasi.

Kami berharap laporan ini memberi gambaran kepada pimpinan, mitra kerja, serta berbagai pihak yang menjadi pengguna layanan Bappeda mengenai posisi/kondisi saat ini, arah kerja, dan upaya perbaikan yang terus kami lakukan guna memberi pelayanan publik yang lebih baik kedepannya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif mendukung pelaksanaan tugas Bappeda serta seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini.

Samarinda, Februari 2024

KEPALA BAPPEDA KALTIM



YUSLIANDO



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kaltim	4
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim	11
Tabel 2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Tahun 2023	12
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kaltim	14
Tabel 2.4	Sasaran Strategis Bappeda Kaltim 2019 - 2023	15
Tabel 2.5	Sasaran Strategis, Indikator, & Target Kinerja Bappeda Kaltim 2023	16
Tabel 2.6	Uraian realisasi anggaran tahun 2023	17
Tabel 3.1	Hasil Penilaian SAKIP Bappeda tahun 2021 & 2022	18
Tabel 3.2	Hasil Evaluasi & Rekomendasi terhadap SAKIP Bappeda Kaltim 2023	19
Tabel 3.3	Sasaran strategis Bappeda Kaltim tahun 2023	22
Tabel 3.4	Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel 3.5	Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran strategis 1	24
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya	23
Tabel 3.7	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi	25
Tabel 3.8	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	28
Tabel 3.9	Program Prioritas yang Capaiannya Belum Masuk Kategori "Sangat Tinggi"	39
Tabel 3.10	Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran	43
Tabel 3.11	Gambaran Singkat Program, kegiatan, sub kegiatan, & rencana aksi pendukung sasaran strategis 1 (2023)	44
Tabel 3.12	Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran strategis 2	49
Tabel 3.13	Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Sasaran 2)	50



Tabel 3.14	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Sasaran 2)	51
Tabel 3.15	Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran (sas 2)	54
Tabel 3.16	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan & Rencana Aksi pendukung capaian sasaran strategis kedua	55
Tabel 3.17	Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran strategis 3	63
Tabel 3.18	Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Sasaran 3)	64
Tabel 3.19	Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Sasaran 3)	65
Tabel 3.20	Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran (Sas 3)	68
Tabel 3.21	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan & Rencana Aksi pendukung capaian sasaran strategis ketiga	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bappeda Kaltim	3
Gambar 1.2	Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Berdasarkan Jabatan & Gender	4
Gambar 1.3	Profil Pegawai Negeri Sipil & Non Pegawai Negeri Sipil di Bappeda Kaltim berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Gambar 1.4	Produk Utama kinerja Bappeda Provinsi Kaltim yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah	7
Gambar 2.1	Dokumen yang menjadi dasar perencanaan strategis Bappeda jangka menengah (periode 2019 – 2023)	10
Gambar 2.2	Rakor SAKIP dalam rangka pemantauan implementasi AKIP di Perangkat Daerah	17
Gambar 3.1	Pemantauan dan evaluasi kinerja bulanan yang dilaksanakan oleh masing-masing kepala bidang (1)	21
Gambar 3.2	Pemantauan dan evaluasi kinerja bulanan yang dilaksanakan oleh masing-masing kepala bidang (2)	21
Gambar 3.3	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuka Pelaksanaan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kaltim 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024	26
Gambar 3.4	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kaltim tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024	26
Gambar 3.5	Penguatan & Sosialisasi Pelajar Peduli Stunting sebagai bagian dari upaya pencapaian program prioritas sektor kesehatan	27
Gambar 3.6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bappeda Kaltim tahun 2023 terkait penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi.	42



Gambar 3.7	Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	43
Gambar 3.8	Koordinasi & Sinkronisasi Sektoral bersama Perangkat Daerah	50
Gambar 3.9	Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait sinkronisasi proses perencanaan & penganggaran (1)	53
Gambar 3.10	Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait sinkronisasi proses perencanaan & penganggaran (2)	53
Gambar 3.11	Janji pelayanan Bappeda Kaltim	62
Gambar 3.12	Form Online Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Bappeda Kaltim yang tersedia di Website Bappeda Kaltim	63
Gambar 3.13	Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Perangkat Daerah sebagai pengguna layanan Bappeda Kaltim	65
Gambar 3.14	Contoh pemantauan rencana aksi & komitmen kinerja bulanan	74
Gambar 3.15	Penyebarluasan informasi pembangunan & kegiatan Bappeda Kaltim di halaman INSTAGRAM Bappeda Kaltim @bappeda_kaltim	75



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Tabel	li
Daftar Gambar	lv
Sekilas LkjIP Bappeda	Vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Sumber Daya Manusia	3
C. Posisi Strategis Bappeda Kaltim	6
D. Permasalahan Utama – Isu Strategis	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2023	9
A. Rencana Strategis 2019 - 2023	9
B. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kaltim	14
C. Komponen Perjanjian Kinerja Strategis	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Bappeda 2023	18
B. Pengukuran capaian kinerja Bappeda Kaltim tahun 2023	22
C. Analisis capaian kinerja Bappeda Kaltim 2023	22
Sasaran 1: Terwujudnya capaian target rencana prioritas pembangunan daerah	23
Sasaran 2: Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	49
Sasaran 3: Meningkatnya kinerja pelayanan BAPPEDA secara internal & eksternal	62
BAB IV. PENUTUP	76



SEKILAS LKJIP BAPPEDA 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran guna mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Proses ini merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yakni rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtiran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja setidaknya memiliki dua tujuan, yakni (1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (BAPPEDA) untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah. Pada periode pembangunan jangka menengah 2019 – 2023, pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kalimantan Timur mengacu pada RENSTRA 2019 – 2023. Dokumen RENSTRA tersebut telah mengalami perubahan pada tahun 2021 sehingga menjadi dokumen **Perubahan RENSTRA 2019 – 2023** sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023. Dalam dokumen tersebut, Bappeda memiliki satu tujuan serta tiga sasaran kinerja. Tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda adalah **Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien**. Sementara Tiga sasaran kinerja adalah (1) Terwujudnya Capaian Target Rencana Prioritas Pembangunan Daerah, (2) Rencana Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD) yang Dijabarkan Dalam Dokumen Anggaran, serta (3) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal.

Pengukuran dan pelaporan kinerja pada LkjIP adalah berdasarkan sasaran strategis sebagaimana disebut pada paragraf di atas. Hasil inventarisasi, perhitungan, & analisis kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran pertama**, dengan indikator persentase prioritas pembangunan yang mencapai target memiliki capaian kinerja sebesar 95,33%. Tingginya capaian kinerja sasaran pertama menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam mengarahkan,



mengkoordinir, melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan, terutama program prioritas telah berjalan sesuai dengan jalur yang direncanakan. Keberhasilan juga menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dari perangkat daerah yang menjadi pengampu program prioritas pembangunan.

2. **Sasaran kedua**, dengan indikator persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran memiliki capaian kinerja sebesar 105,26%. Nilai target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 95% dengan realisasi kinerja 100%. Pencapaian ini menunjukkan bidang perencana di Bappeda Kaltim telah menunjukkan kinerja yang baik dalam upaya memastikan program yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan didukung atau memperoleh alokasi anggaran belanja daerah.
3. **Sasaran ketiga**, dengan indikator persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Prov. Kaltim memiliki capaian kinerja sebesar 100,25%. Serupa dengan dua sasaran strategis lainnya, kinerja telah melampaui target tahunan. Tahun 2023, kinerja pelayanan Bappeda Prov. Kaltim ditargetkan mencapai 79,55% dengan capaian hingga akhir tahun 2023 sebesar 79,75%. Nilai yang melampaui target ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan akan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Capaian tahunan menjadi titik evaluasi untuk dapat melakukan perbaikan kinerja kedepan. Oleh karena itu, selain melakukan inventarisasi, penyusunan LkjlP ini juga diikuti dengan proses analisis guna memperoleh informasi terkait aspek apa saja yang dapat di mana perbaikan kinerja organisasi dapat dilakukan. Laporan ini menyajikan hasil analisis pencapaian kinerja diikuti informasi mendetail lain terkait proses pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kaltim pada akhir periode perencanaan jangka menengah 2019 – 2023.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam peraturan tersebut, pimpinan organisasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan tugas Bappeda Kaltim diselenggarakan melalui fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah provinsi, meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan;
- d. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya

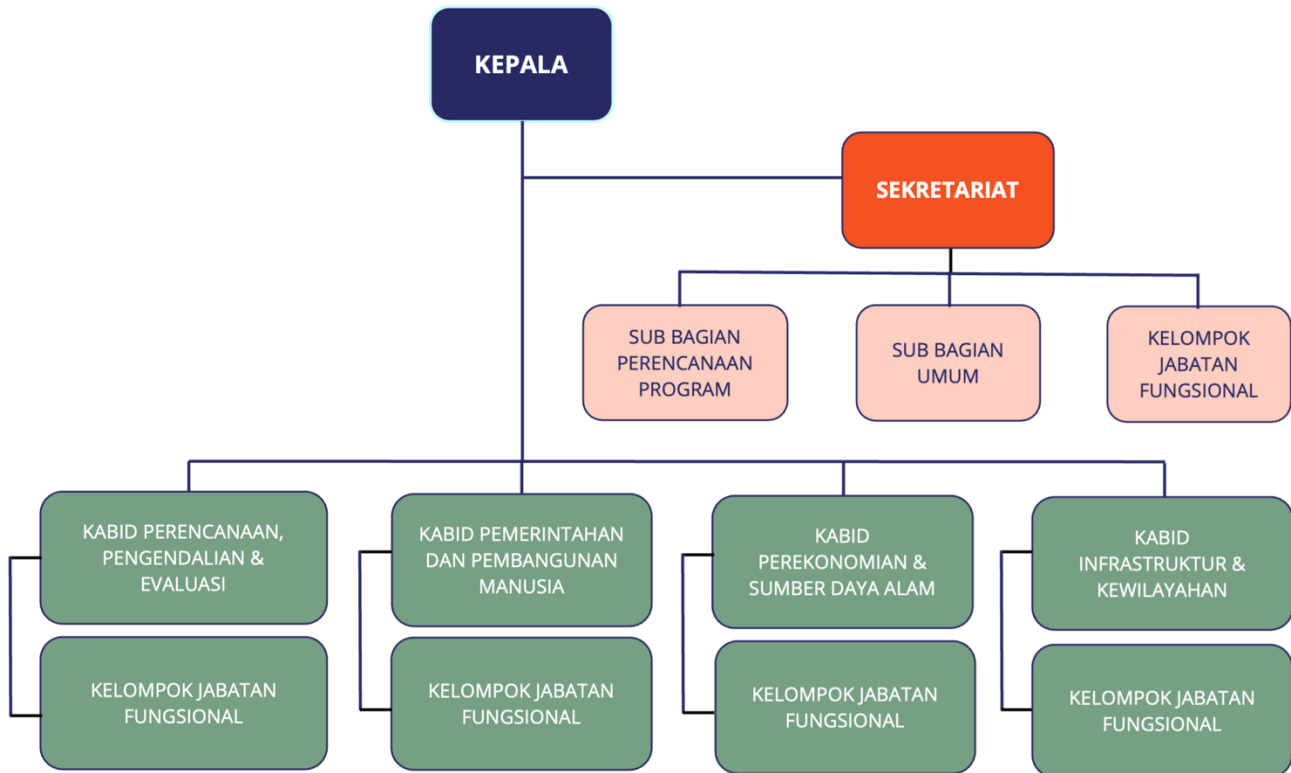


Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Kepala Badan memiliki beberapa uraian tugas, yakni:

- a) merumuskan program kerja di lingkungan badan berdasarkan rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana
- c) membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yg diharapkan;
- d) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
- f) melaksanakan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia
- g) melaksanakan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam
- h) melaksanakan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
- j) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas badan;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur baik lisan maupun tertulis

Susunan/struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat membawahkan:
 - o Subbagian Perencanaan Program;
 - o Subbagian Umum; dan
 - o Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f) Bidang Infrastruktur dan kewilayahan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kaltim Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2023

B. Sumber Daya Manusia

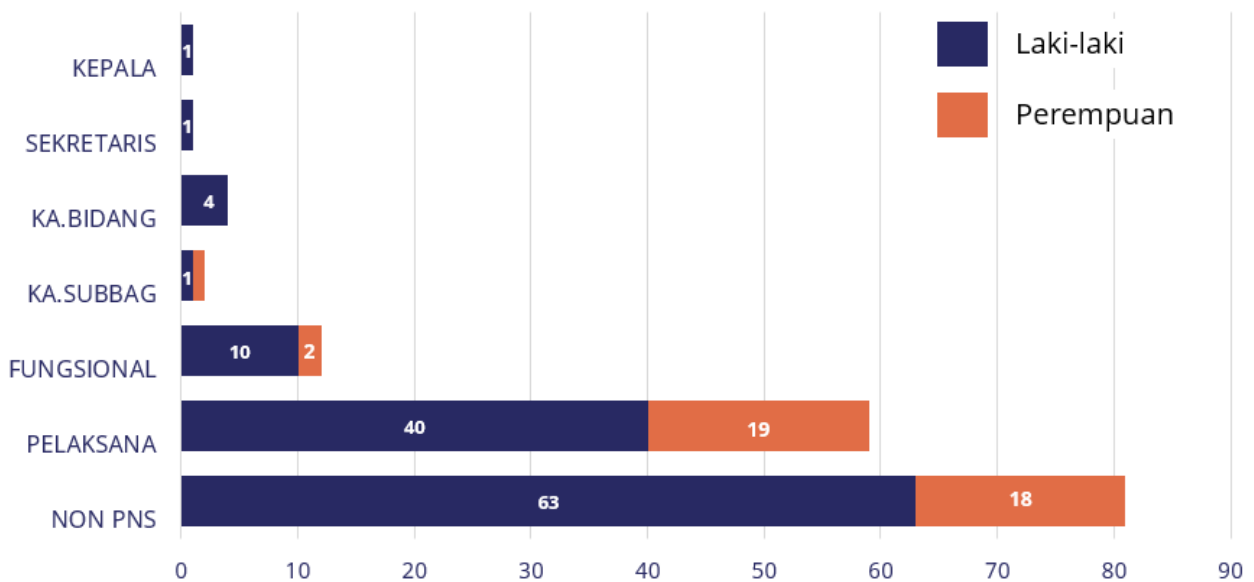
Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Sumber Daya Manusia ASN mencakup berbagai elemen seperti pengetahuan, keterampilan, dan komitmen yang akan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan suatu instansi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan regulasi yang ada, tetapi juga kemampuan dan dedikasi personel Aparatur Sipil Negara yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan personel Non Aparatur Sipil Negara. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik. Selain itu, Aparatur Sipil Negara yang memiliki etos kerja yang tinggi dan berintegritas dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia sifatnya esensial untuk mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Tabel 1.1 Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kaltim

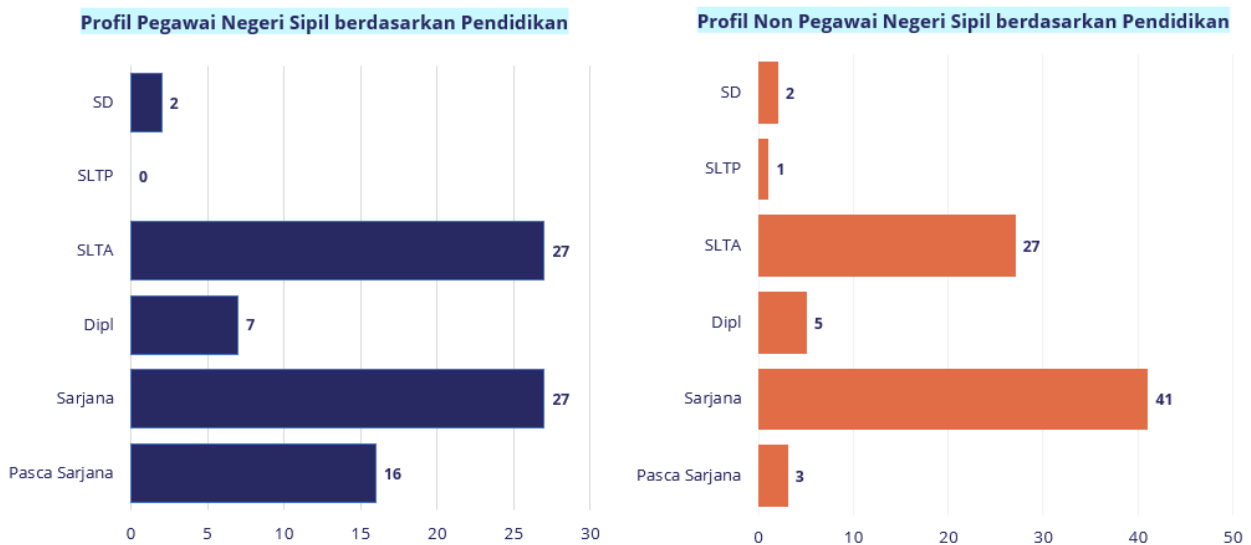
Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Tingkat Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Badan	1		1					1				
Sekretaris	1		1				1					
Ka. Bidang	4		3	1			4					
Ka. subbag	1	1	1	1			2					
Jabatan Fungsional	10	2	2	10			6	6				
Staf Pelaksana	40	19		44	13	2	3	20	7	27		2
JML ASN	57	22	8	56	13	2	16	27	7	27		2
JML Non ASN	63	18					3	41	5	29	1	2
TOTAL	120	40	8	56	13	2	19	68	12	56	1	4

Hingga akhir tahun 2023, Jumlah personel/pegawai yang bekerja di BAPPEDA Prov. Kaltim adalah sejumlah 160 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 79 (Tujuh Puluh Sembilan) orang Tenaga PNS dan 81 (Delapan Puluh Satu) orang Pegawai Non PNS.



Gambar 1.2 Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Berdasarkan Jabatan & Gender

Tabel 1.1 yang didukung oleh gambar 1.2 menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait perencanaan didominasi oleh pria, yakni sebesar 75% atau sejumlah 120 orang. Kontribusi wanita dalam pelaksanaan tugas di Bappeda Kaltim adalah sebesar 25% atau secara kuantitas berjumlah 40 orang.



Gambar 1.3 Profil Pegawai Negeri Sipil & Non Pegawai Negeri Sipil di Bappeda Kaltim berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 1.3 secara ringkas membantu memberikan gambaran mengenai profil tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Data menunjukkan bahwa mayoritas PNS memiliki tingkat pendidikan Strata 1 atau Sarjana dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara baru sejumlah enam belas orang (20,25%) yang memiliki kualifikasi pendidikan Strata 2 (Master). Kondisi ini diperlukan untuk perencanaan peningkatan kompetensi kedepan, terutama dalam distribusi pelaksanaan tugas serta perencanaan jenjang karir dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Kaltim.

Pegawai Non PNS juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas kedinasan bidang perencanaan. Saat ini, pegawai Non PNS didominasi oleh personel dengan kompetensi sarjana, diikuti dengan personel kompetensi Sekolah Menengah Atas (SMA). Kondisi ini juga dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan organisasi serta proses distribusi pegawai Non PNS guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sifat pekerjaan di lingkungan Bappeda Kaltim dapat dikatakan seragam. Sebagai instansi yang memerlukan kemampuan/kompetensi olah pikir, Bappeda membutuhkan Sumber Daya Manusia dengan tingkat pendidikan kategori pendidikan tinggi. Di samping itu, untuk pelaksanaan tugas reguler maupun sehari-hari, juga diperlukan sumber daya manusia dengan kualifikasi terampil. Kolaborasi dari kedua profil SDM ini (pendidikan tinggi dan terampil) dapat membantu Bappeda dalam memetakan distribusi penugasan (yang juga



mempertimbangkan kualifikasi pendidikan) serta kebutuhan peningkatan keterampilan dan kompetensi.

C. POSISI STRATEGIS BAPPEDA KALTIM

BAPPEDA Kaltim hadir untuk melaksanakan urusan pemerintahan berkaitan dengan perencanaan. Pelaksanaan tugas organisasi utamanya mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Bisnis Utama (core business) yang dijalankan akan menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek (tahunan), jangka menengah (lima tahunan) serta jangka panjang (20 tahun). Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing. Kedudukan dokumen perencanaan menjadi krusial karena merupakan awal atau hulu dari seluruh proses pembangunan, termasuk belanja daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah.

Perencanaan pembangunan perlu memiliki sifat adaptif terhadap dinamika pembangunan namun tetap mengacu pada visi misi yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam implementasi dan pelaksanaan tugas, penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) harus menjadi pedoman utama untuk meningkatkan kinerja institusi yang bersifat inklusif, transparan, akuntabel, dst. Sifat atau prinsip berkelanjutan juga perlu dijaga dan dipastikan kehadirannya dalam setiap produk perencanaan pembangunan. Keberlanjutan ini juga mencakup pengertian bahwa substansi yang telah direncanakan perlu terus diupayakan implementasinya untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Bappeda memiliki posisi strategis dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran yang pada akhirnya, pembangunan harus menunjukkan hasil berupa kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat.



Jangka Panjang (20 tahun)

Jangka menengah (5 tahun) & Transisi

Jangka Pendek (1 tahun)

Gambar 1.4 Produk Utama kinerja Bappeda Provinsi Kaltim yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah

D. Permasalahan Utama – Isu Strategis

Beberapa tantangan atau permasalahan yang masih dihadapi oleh Bappeda Kaltim dalam menjalankan tugasnya di bidang perencanaan pemerintahan antara lain:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari aspek kuantitas dan kualitas untuk merespon perubahan/dinamika pembaharuan teknologi (aplikasi, sistem informasi) yang kerap kali terjadi dalam waktu yang relatif cepat
- 2) Penggunaan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai fondasi atau basis utama dalam penyusunan rencana kerja hingga alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk evaluasi/efisiensi tahun berjalan maupun periode maju (n+1)
- 3) Kekuatan data baik spasial maupun statistik terkait (1) kualitas, kelengkapan, dan tingkat kedalaman substansi data (2) keberadaan Sumber Daya Manusia untuk melakukan analisis dan ekstraksi informasi (3) Proses pemutakhiran sistem atau aplikasi yang seringkali menghambat penyelesaian tugas
- 4) Proses evaluasi dan pelaporan yang terhambat karena beberapa faktor, antara lain (1) Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi (2) Upaya pengaturan jadwal kegiatan antar unit kerja (bidang) yang masih perlu penataan agar dapat terpadu dengan baik (3) Terbatasnya ketersediaan staf teknis untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (6) Kebutuhan akan data hasil capaian pada level program dan kegiatan yang



seringkali kurang lengkap dan belum dapat dipastikan tingkat akurasi dan validitasnya.

Refleksi terhadap permasalahan yang ada dalam pelaksanaan tugas kedinasan terkait perencanaan pembangunan, dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian organisasi dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan. Isu-isu tersebut yakni:

- 1) Koordinasi yang efektif dan tepat sasaran terhadap Perangkat Daerah dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- 2) Optimalisasi dan integrasi penggunaan aplikasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- 3) Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- 4) Penyediaan dan pemutakhiran data/Informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan
- 5) Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan serta pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan
- 6) Percepatan pelaporan melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi
- 7) Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi hasil capaian program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2023

A. Rencana Strategis 2019 - 2023

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan elemen penting dalam meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah menekankan bahwa perencanaan strategis menjadi dasar atau acuan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja. Oleh karena itu dalam proses penyusunan perencanaan kinerja, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada visi dan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah periode bersangkutan (RPJMD 2019 – 2023). Dokumen tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023.

Menindaklanjuti perubahan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD 2019 – 2023), Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami perubahan dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023. Dalam perubahan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023, fokus utama dalam lima tahun ke depan adalah mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang tercakup dalam visi misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023. Fokus tersebut akan diwujudkan melalui langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai masalah dan hambatan yang belum sepenuhnya teratasi, serta yang diperkirakan akan muncul dalam lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus pada sasaran yang akan dicapai dalam periode yang sedang berjalan.



Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan peran sebagai perangkat pemerintahan daerah, Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan sebagai cerminan dari peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal ini juga merefleksikan kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur seiring dengan berbagai agenda pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Rincian perumusan tujuan, sasaran, beserta Program/Kegiatan digambarkan secara singkat dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2



Gambar 2.1 Dokumen yang menjadi dasar perencanaan strategis Bappeda jangka menengah (periode 2019 – 2023)

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian s.d. Th 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,55	76,55	76,60	76,65	77,00	78,00
		Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target (%)	-	-	-	65	85	95
		Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran (%)	-	-	-	85	90	95
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim (%)	-	-	-	79,44	79,46	79,55

Tabel. 2.2. Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target (%)	A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
				2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
				3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran (%)	B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				5. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				6. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim (%)	C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah 10. Administrasi Umum Perangkat Daerah 11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tabel 2.3 menggambarkan tugas, fungsi, serta Indikator Kinerja Utama Bappeda Kaltim.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kaltim

Tugas	:	Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah; b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan; d. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; j. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah; k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan l. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya
IKU	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target 2. Persentase Program/Kegiatan Bidang Perencanaan (PSDA, PPM, Infraswil) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran 3. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Kaltim



Tabel 2.4 Formulasi Perhitungan Sasaran Strategis Bappeda Kaltim 2019 - 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data
Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target	Jumlah Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target / Jumlah Seluruh Prioritas Pembangunan x 100%	Evaluasi RPJMD
Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	Jumlah Program/Kegiatan dalam Dokumen Anggaran /Jumlah Program/Kegiatan dalam Dokumen perencanaan x 100%	RPJMD, RKPD
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	<p>a. Nilai Indeks = (Unsur Persyaratan x 0,11) + (Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur x 0,11) + (Unsur Waktu Penyelesaian x 0,11) + (Unsur Biaya/Tarif x 0,11) + (Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan x 0,11) + (Unsur Kompetensi Pelaksanan x 0,11) + (Unsur Perilaku Pelaksanan x 0,11) + (Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan x 0,11) + (Unsur Sarana dan Prasarana x 0,11)</p> <p>b. NRR Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah quisioner yang terisi.</p> <p>c. NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111,</p> <p>d. IKM = Jumlah NRR Tertimbang x 25</p>	Kuesioner



C. Komponen Perjanjian Kinerja Strategis

1) Target Sasaran Strategis Bappeda Kaltim tahun 2023

Tabel berikut menggambarkan komponen pengukuran kinerja sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kaltim.

Tabel 2.5 Sasaran Strategis, Indikator, & Target Kinerja Bappeda Kaltim 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target (%)	95
Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran (%)	95
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim (%)	79,55

2) Anggaran belanja tahun 2023

Guna mencapai sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam dokumen kinerja, Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun Anggaran 2023 memperoleh alokasi anggaran murni sebesar Rp 60.867.730.869. Pada anggaran perubahan tahun 2023, Bappeda memperoleh tambahan pagu sebesar Rp 5.189.939.488 dengan rincian:

- Tambahan dana FCPF-CF sebesar Rp 3.700.000.000
- Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebesar Rp. 45.000.000
- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.160.000
- Dana Pembayaran BPJS Tahun 2020 sebesar Rp. 128.673.988,-, Dana Kenaikan Gaji Non ASN Sebesar Rp. 280.350.000
- Dana Kenaikan TPP PNS sebesar Rp. 1.027.755.500

Dari tambahan alokasi tersebut, pagu anggaran Bappeda Kaltim pada APBD Perubahan tahun 2023 menjadi Rp 66.057.670.357. Hingga akhir tahun 2023, anggaran yang dapat direalisasikan sebesar 94,51% atau Rp 62.432.344.396.

Tabel 2.6 Uraian realisasi anggaran tahun 2023

PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.509.125.107	37.466.523.901	94,83%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	12.551.894.250	12.138.102.755	96,7%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.996.651.000	12.827.717.740	91,65%
Realisasi anggaran Bappeda Kaltim tahun 2023			94,51%



Gambar 2.2 Rakor SAKIP dalam rangka pemantauan implementasi AKIP di Perangkat Daerah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Bappeda tahun 2023

1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Hasil Penilaian SAKIP Bappeda tahun 2021 & 2022

Komponen Penilaian	2021		2022	
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
Perencanaan kinerja	30	25,28	30	24,00
Pengukuran kinerja	25	16,56	20	14,80
Pelaporan kinerja	15	13,56	10	8,00
Evaluasi internal	10	4,87		
Pencapaian sasaran/kinerja organisasi	20	14,29		
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0		20	14,40
Capaian Akuntabilitas Kinerja	0		20	15,20
NILAI HASIL EVALUASI		74,56		76,40
KATEGORI PENILAIAN		BB		BB

Terdapat peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Bappeda tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai SAKIP dari 74,56 menjadi 76,40 dengan kategori penilaian BB. Meskipun terjadi peningkatan nilai, nilai SAKIP tahun 2021 dan 2022 tidak secara langsung dibandingkan karena adanya perubahan metode perhitungan/penilaian sebagaimana Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah (Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 tahun 2022). Perubahan ini meliputi bobot komponen, sub komponen, serta kriteria peninaian.

2) Tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan kepada Bappeda kaltim sebagai hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja tahun 2022. Tabel 3.2 menjabarkan hasil evaluasi/rekomendasi tersebut serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh BAPPEDA Kaltim.



Tabel 3.2 Hasil Evaluasi & Rekomendasi terhadap SAKIP Bappeda Kaltim 2023

No	Hasil Evaluasi/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sudah/Belum
POIN EVALUASI			
1	Rencana aksi kinerja yang telah dibuat tidak dilakukan pemantauan secara berkala sehingga tidak terlihat adanya perbaikan/penyempurnaan atas capaian kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> o Pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala melalui pelaksanaan rapat kendali yang dilakukan setiap bulan, dipimpin oleh Kepala Bappeda & Sekretaris Bappeda 	Sudah
2	Pemantauan atas pengukuran kinerja baru dilakukan hingga level manajerial (eselon IV) saja	<ul style="list-style-type: none"> o Pemantauan atas pengukuran kinerja hingga level staf telah dilakukan per triwulan menggunakan aplikasi SIAKIP & E-KINERJA. o Pemantauan kinerja hingga level pimpinan dilakukan berkala secara bulanan melalui rapat kendali o Mulai Bulan Oktober tahun 2023 (setelah diperoleh hasil evaluasi AKIP 2022), telah dilakukan pemantauan bulanan/rapat kendali bulanan hingga level staf oleh masing-masing Kepala Bidang dan Sekretaris 	Sudah
REKOMENDASI			
1	Melakukan pemantauan atas rencana aksi kinerja secara berkala yang dilengkapi hasil laporan pemantauan/monev dengan menginformasikan perbaikan/penyempurnaan atas capaian kinerja yang telah ditetapkan sehingga terlihat kondisi yang lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya	Telah dilakukan pemantauan atas rencana aksi kinerja secara berkala (bulanan) dan hasil pelaksanaan pemantauan telah didokumentasikan secara terstruktur dengan memberikan informasi mengenai capaian perbaikan yang telah diperoleh dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya	Sudah



No	Hasil Evaluasi/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sudah/Belum
2	Pemantauan atas pengukuran kinerja agar dilakukan triwulanan hingga level staf	Seluruh staf telah memiliki Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar pemantauan target kinerja. Pemantauan secara triwulanan dilakukan melalui aplikasi SIAKIP & E-KINERJA	Sudah
3	Berupaya maksimal untuk meningkatkan nilai pada setiap komponen penilaian SAKIP sehingga nilai SAKIP dapat mengalami peningkatan	Telah dilakukan analisis & identifikasi kekuatan serta potensi perbaikan pada seluruh komponen/aspek AKIP di lingkungan Bappeda Kaltim. Hasil analisis ini menjadi pedoman bagi Bappeda Kaltim untuk melakukan perbaikan/peningkatan kinerja serta memastikan prinsip akuntabel terpenuhi	Sudah
4	Mempertahankan & meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya	Upaya perbaikan dilakukan secara berkelanjutan yakni dengan melaksanakan rapat kendali dengan penuh komitmen untuk memastikan kinerja memiliki progress yang baik serta prinsip-prinsip good governance (terutama akuntabel) diimplementasikan	Sudah



Gambar 3.1 Pemantauan dan evaluasi kinerja bulanan yang dilaksanakan oleh masing-masing kepala bidang (1)



Gambar 3.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja bulanan yang dilaksanakan oleh masing-masing kepala bidang (2)



B. Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2023

Berdasarkan RENCANA KERJA (RENJA) & RENJA PERUBAHAN BAPPEDA Provinsi Kaltim tahun 2023 (Berdasarkan Rencana Strategis/RENSTRA tahun 2019 – 2023), terdapat tiga sasaran strategis yang menjadi arah pelaksanaan kinerja. Tabel 3.3 menggambarkan ketiga sasaran strategis tersebut.

Tabel 3.3 Sasaran strategis Bappeda Kaltim tahun 2023

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi	Tk. Capaian (%)
Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target (%)	95	88,41	93,06
Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	95	100	105,26
Meningkatnya kinerja pelayanan BAPPEDA secara internal & eksternal	Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	79,55	79,75	100,25

C. Analisis capaian kinerja Bappeda Kaltim Tahun 2023

BAPPEDA Prov. Kaltim telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tahun 2023 merupakan periode/tahun terakhir dari Pelaksanaan RENSTRA Tahun 2019 – 2023.



Penyusunan analisis capaian kinerja organisasi (BAPPEDA KALTIM) berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara garis besar, pengukuran capaian kinerja dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun yang dinilai;
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dinilai dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;
- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun yang dinilai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan;
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan realisasi capaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, yakni:

Tabel 3.4 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017

I. Sasaran 1: Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran ini menggambarkan kinerja organisasi dalam melaksanakan penyusunan, koordinasi dan pengendalian terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian target dari program-program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan



daerah perlu diupayakan untuk berjalan secara optimal dan mencapai target yang ditetapkan. Alat ukur kinerja sasaran pertama adalah menghitung program prioritas pembangunan tahun 2023 yang mencapai target yang telah ditetapkan.

Program prioritas dikategorikan sebagai program yang "Tercapai" realisasi kinerjanya jika memiliki capaian di atas 91%. Nilai ini mengadopsi skala nilai peringkat kinerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. PERMENDAGRI tersebut membagi peringkat kinerja menjadi lima kelas, di mana nilai capaian di atas 90% dikategorikan sebagai realisasi kinerja sangat tinggi.

Tabel beserta uraian selanjutnya akan memberikan gambaran mengenai indikator yang digunakan, target, serta realisasi dari kinerja strategis (sasaran) pertama.

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.5 Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran strategis 1

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target	%	95	88,41	93,06

Kinerja strategis pertama Bappeda Kaltim tahun 2023 mencapai 93,06%. Walaupun masuk dalam kategori "Sangat Tinggi" masih ada aspek yang perlu menjadi perhatian, evaluasi, dan perbaikan kinerja kedepan. Pembahasan/analisis secara komprehensif mengenai realisasi dan capaian kinerja strategis pertama akan dilakukan bersamaan setelah proses analisis terhadap capaian tahun sebelumnya serta analisis lainnya dilakukan.



2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya

Indikator	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target	65%	43,09%	85%	93,75%	95%	88,41%

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2023 masih di bawah target yang ditetapkan atau capaian kinerja tidak mencapai 100% melainkan sebesar **93,06%**. Nilai capaian dapat dikatakan "Sangat Tinggi" walaupun belum mencapai target yang ditetapkan (100%). Observasi periodik melalui perbandingan dengan tahun sebelumnya (2022) juga menunjukkan penurunan. Pada tahun 2022, persentase program prioritas pembangunan yang mencapai target adalah 93,75%.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Bappeda 2019 – 2023)

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target	%	95	88,41%	Capaian sebesar 93,06%

Pada akhir periode perencanaan jangka menengah 2019 – 2023, sasaran strategis pertama memiliki capaian sebesar 93,06% walaupun belum mencapai target namun dapat dikategorikan sebagai pencapaian "Sangat Tinggi". Kondisi yang belum mencapai target ini disebabkan oleh belum tercapainya delapan indikator target program prioritas. Kedelapan indikator program tersebut memiliki capaian agregat di bawah 91% sehingga masuk dalam kategori "belum mencapai target". Program prioritas tersebut digambarkan pada tabel 3.9.



Gambar 3.3 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuka Pelaksanaan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kaltim 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024



Gambar 3.4 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kaltim tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024



Gambar 3.5 Penguatan & Sosialisasi Pelajar Peduli Stunting sebagai bagian dari upaya pencapaian program prioritas sektor kesehatan

Tabel 3.8 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas	Indikator Program	Target	PD
PRIORITAS PEMBANGUNAN 1								
Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan yang Mendukung Daya Saing SDM								
Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,25				
	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,04	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	%	0,85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
					Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan	70%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,60	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas	Indikator Program	Target	PD
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60%	Dinas Kesehatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65,64	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	6,00				
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,75				
	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	35,00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas	Indikator Program	Target	PD
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6825	Program Admnistrasi Pemerintahan Desa	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara Optimal	35 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2								
Penguatan Pelaku dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat								
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5±1				
		PDRB per Kapita	Juta Rp	170				
		LPE Non Migas dan Batubara	%	2,00				
		Nilai Tukar Petani	Nilai	113,00				

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas	Indikator Program	Target	PD	
	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB	%	0,65	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/ Dipelihara	1 Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
						Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	80000 Ha		
						Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi padi	279681 Ton		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	283592 Ton		
					Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	330 orang		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	4 lembaga						
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	0,37	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	49 Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	21%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas	Indikator Program	Target	PD
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB	%	5,20	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,067 Juta Ton CO2eq	Dinas Perkebunan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok	Dinas Perkebunan
						Luas Kebun yang dibangun	1.462.645 Ha	
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan	18.126.490,20 ton	Dinas Perkebunan
					Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 Lembaga	Dinas Perkebunan
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	Dinas Perkebunan
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	1,70	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297.805,90 Ha	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593 ton	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas	Indikator Program	Target	PD
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441 ton	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah olahan hasil perikanan yang dipasarkan	3 Jenis	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,07	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 ha	Dinas Kehutanan
					Program Pengelolaan Hutan	Produksi Hasil Hutan Kayu	5.000.000/ton	Dinas Kehutanan
						Produksi Hasil Hutan Non Kayu	7,5 juta ton	
	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB	%	13,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas	Indikator Program	Target	PD
					Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	9,67	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	Dinas Pariwisata
		Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB	%	15,23	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53%	Dinas Pariwisata
PRIORITAS PEMBANGUNAN 3								
Peningkatan Kemudahan Berinvestasi Di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam Terbarukan Dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan								
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5±1				
		PDRB per Kapita	Juta Rp	170				
		LPE Non Migas dan Batubara	%	2,00				

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas	Indikator Program	Target	PD
		Nilai Tukar Petani	Nilai	113,00				
	Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah	Miliar Rp	11.038	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	100 %; 108.243 Wajib Pajak	Badan Pendapatan Daerah
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100%	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara	Miliar US\$	1,72	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB	%	9,64	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara	Triliun Rp	35,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	Waktu penyelesaian proses perizinan	11 Hari	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas	Indikator Program	Target	PD
								Terpadu Satu Pintu
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,05				
	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU	%	28,50	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)	53,80	Dinas Lingkungan Hidup
						Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,16	
						Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79,86	
						Indeks kualitas air laut (IKAL)	83,61	
	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	151,49	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82,67%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PRIORITAS PEMBANGUNAN 4 Penguatan Konektivitas Antar Daerah, Kawasan dan IKN								
Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar		Indeks Gini	Indeks	0,313				
	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur	Jumlah Penumpang yang terlayani	Orang	6.000.000	Program Pengelolaan Pelayanan	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87%	Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas	Indikator Program	Target	PD
dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan		Jumlah barang yang diangkut	Ton	337.000.000	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	427 Kasus	Dinas Perhubungan
		Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung	Kawasan	5	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76,15%	DPUPRPERA
		Capaian akses air minum layak	%	68,53	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66,64%	DPUPRPERA
		Luas lahan pertanian yang beririgasi	Ha	14.278,50	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	70,50 %	DPUPRPERA
		Luas kawasan kumuh	Ha	1.187,82	Program Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70.781 unit	DPUPRPERA
		Luas genangan banjir perkotaan	Ha	374	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3020 meter	DPUPRPERA
		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	76,74	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,91 indeks	DPUPRPERA
		Rasio Elektrifikasi	%	93,00	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pemanfaatan EBT	7,34%	DESDM
					Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	1.165.000 KK	DESDM

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas	Indikator Program	Target	PD
PRIORITAS PEMBANGUNAN 5								
Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik								
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (71,50)				
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,10	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,25				
	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	77,00	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79%	Sekretariat Daerah
						Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79%	Sekretariat Daerah
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level	Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90%	Inspektorat	

Tabel 3.9 Program Prioritas yang Capaiannya Belum Masuk Kategori "Sangat Tinggi"

No	Program	Indikator	Target kinerja 2023	Realisasi 2023 (TW IV)	Capaian	Kinerja anggaran (%)	PD
1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	27,5	88,71%	80,83%	Disnakertrans
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5%	-25,09	-501,8%	97,39	Disperindagkop & UMKM
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	3	2,50	83,33%	99,12	Disperindagkop & UMKM
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	10	3	30,00%	99,10	Disperindagkop & UMKM
5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	6 Hari	10 Hari	33,33%	93,80%	DPMPTSP
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	777 Wajib Pajak	520 Wajib Pajak	66,92%	94,89%	BAPENDA
		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100%	74,78%	74,78%	94,89%	BAPENDA
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi padi	289846 Ton	215290 Ton	74,28%	95,74%	Dinas Pangan TPH



4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Tercapai atau tidaknya target kinerja program sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang dapat dikendalikan maupun hal di luar kendali Bappeda & Perangkat Daerah. Indikator program memiliki karakter manfaat, yakni kondisi positif apa yang dapat dirasakan/dinikmati sekalipun. Karena sifat dari pencapaian program adalah manfaat secara luas, pada berbagai kondisi target program dapat dicapai jika terdapat kinerja pihak/stakeholder lainnya, misal: Pemerintah Pusat, sektor swasta, kelompok masyarakat, dsb.

Terdapat beberapa hal atau faktor yang mendorong keberhasilan organisasi dalam mengupayakan tercapainya target kinerja program. Beberapa diantaranya adalah:

- 1) **Kemampuan untuk menentukan target kinerja berdasarkan data & analisis yang akurat dan mutakhir.** Dengan memahami bagaimana sebuah program berjalan serta bagaimana sebuah program dapat mencapai target manfaat yang diharapkan, perencana dapat menentukan target yang mungkin dicapai sesuai dengan sumber daya yang tersedia, baik waktu, biaya/anggaran, serta sumber daya lainnya
- 2) **Koordinasi yang efektif serta keselarasan substansi antara proses perencanaan dan penganggaran.** Target yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan hendaknya didukung dengan alokasi anggaran. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara cermat dan teliti agar penggunaannya tepat sasaran
- 3) **Proses pemantauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara konsisten.** Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja sebuah program. Pemantauan/evaluasi hendaknya dilaksanakan secara berkala agar jika terdapat kendala, dapat segera diselesaikan dan apabila kinerja program berbeda dari yang direncanakan, langkah antisipatif dapat dilakukan.
- 4) **Kemampuan perencana dalam pendampingan dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.** Target kinerja Pemerintah Daerah hendaknya didukung oleh aksi yang diturunkan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perencana (personil Bappeda Kaltim) perlu memastikan bahwa target strategis pemerintah daerah hingga visi misi daerah didukung oleh kinerja strategis perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)



Sementara itu, faktor yang dapat menyebabkan penurunan kinerja organisasi, dalam hal ini kinerja Bappeda untuk memastikan program prioritas pembangunan dapat terlaksana, tepat sasaran, dan mencapai target yang ditetapkan, adalah negasi atau kebalikan dari faktor-faktor yang disebutkan di atas. Tidak optimalnya analisis untuk memprediksi target, kurangnya akurasi dalam menentukan indikator dan target kinerja, koordinasi yang belum optimal dan efektif, tidak terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta belum optimalnya fungsi Bappeda dalam pendampingan dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, menjadi faktor yang dapat menurunkan kinerja organisasi.

Di samping kondisi-kondisi tersebut, penurunan kinerja Bappeda Kaltim dapat dipengaruhi oleh Jumlah indikator yang pencapaian targetnya dipengaruhi faktor-faktor di luar kendali Bappeda dan Perangkat Daerah. Semakin banyak indikator yang pencapaian targetnya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan di luar kendali aparatur, maka nilai kinerja organisasi semakin rentan mengalami fluktuasi dan dapat dikatakan sulit untuk memastikan bahwa dengan aksi atau upaya tertentu, suatu target dapat dicapai. Contoh dari faktor tersebut misalnya kinerja organisasi lainnya (Pemerintah Pusat, Organisasi Masyarakat, Pihak Swasta, stakeholder pembangunan lainnya), kebijakan oleh Pemerintah Pusat, kondisi alam, dan sebagainya.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bappeda Kaltim. Kualitas perencanaan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan olah pikir Sumber Daya Manusia di Bappeda Kaltim. Peningkatan kapasitas dapat membantu perencana untuk meningkatkan kompetensinya dalam melakukan analisis data, interpretasi data dan fenomena pembangunan dan mengaitkannya dengan hal yang berpengaruh pada pembangunan daerah, termasuk kinerja perencanaan di perangkat daerah.
2. Mengupayakan serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Memastikan proses verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah dilakukan dengan tepat mutu terutama keselarasannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk memastikan proses ini dapat diimplementasikan serta terukur, Bappeda telah memasukkan keselarasan antara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah



satu aspek penting yang menunjukkan kualitas perencanaan. Aspek keselarasan ini menjadi salah satu komponen dalam indikator "Indeks Kualitas Perencanaan".

4. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara konsisten tiap Triwulan. Tahapan ini juga telah didukung dengan pemanfaatan Teknologi Informasi, yakni melalui aplikasi EVDOREN



Gambar 3.6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bappeda Kaltim tahun 2023 terkait penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi.



Gambar 3.7 Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dalam suatu upaya dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat efisiensi sumber daya dapat dinilai dari kuantitas sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai efisien jika hasil yang diharapkan dapat tercapai (secara kualitas dan kuantitas) dengan menggunakan sumber daya dengan kuantitas minimal. Tabel 3.10 menggambarkan faktor yang akan dikalkulasi untuk memperoleh gambaran efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.10 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran

Sasaran strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Kinerja anggaran (%)	Efisiensi (%)
Terwujudnya capaian target rencana prioritas pembangunan daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target	93,06%	96,7%	Akan dihitung secara agregat



Dari aspek waktu, evaluasi kinerja pada triwulan III 2023 menunjukkan bahwa dari 65 alat ukur program prioritas, terdapat 60% (39 item) program prioritas yang capaian kerjanya sudah di atas 91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa beberapa perangkat daerah pengampu program prioritas telah mampu menggunakan waktu (tahun anggaran) secara efisien untuk mencapai target kerjanya.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya pencapaian target sasaran "Tercapainya target prioritas pembangunan" didukung oleh pelaksanaan "Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah". Pelaksanaan program tersebut tahun 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp12.551.894.250. Secara lebih mendetail, kinerja program tersebut serta uraian aksi disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11 Gambaran Singkat Program, kegiatan, sub kegiatan, & rencana aksi pendukung sasaran strategis 1 (2023)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	%	80		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	95		
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	Dokumen	1		
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Laporan Pelaksanaan dan Berita Acara	Laporan	1	A.	Konsultasi Publik Penyusunan RKPDP Prov. Kaltim Tahun 2024
				1.	Penyiapan materi dan bahan Konsultasi Publik Penyusunan RKPDP Prov. Kaltim Tahun 2024



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
					2. Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Berita Acara Kesepakatan Musrenbang	Dokumen	1	A.	Pra Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024
				1.	Penyiapan materi dan bahan Musrenbang Prov. Kaltim Penyusunan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024
				2.	Pelaksanaan Pra Musrenbang Prov. Kaltim Penyusunan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024
				B.	Musrenbang Prov. Kaltim Penyusunan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	A.	Penyusunan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024
				1.	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD
				2.	Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD
				3.	Penyusunan rancangan awal RKPD
				4.	Penyempurnaan Ranwal RKPD sesuai hasil konsultasi publik
				5.	Penyusunan Rancangan RKPD
				6.	Penyampaian SE. Gubernur perihal Rancangan RKPD
				7.	Penyusunan Rancangan Akhir berdasarkan BA kesepakatan Musrenbang
				8.	Evaluasi rancangan akhir RKPD ke Mendagri
				9.	Penyempurnaan hasil evaluasi rancangan akhir RKPD
				10.	Penetapan Peraturan Gubernur Tentang RKPD
				B.	Penyusunan P-RKPD Tahun 2023
				1.	Rapat TAPD membahas Perubahan RKPD Tahun 2023
				2.	Penyusunan Kamus Usulan P-RKPD 2023



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
				3.	Penyusunan Rancangan P-RKPD Tahun 2023
				4.	Input Usulan aspirasi Pokir
				5.	Verifikasi Pokir oleh Setwan
				6.	Verifikasi Pokir oleh SKPD
				7.	Input rancangan P-Renja/P-RKPD Tahun 2023
				8.	Penyusunan Rancangan Akhir P-RKPD Tahun 2023
				9.	Finalisasi Rancangan Akhir P-RKPD Tahun 2023
				10.	Penyampaian Reviu APIP
				11.	Reviu APIP P-RKPD Tahun 2023
				12.	Sinkronisasi Pokir ke dalam Sub Kegiatan
				13.	Tindak lanjut LHR APIP P-RKPD Tahun 2023
				14.	Fasilitasi Raperkada ttg P-RKPD Tahun 2023
				15.	Penyempurnaan P-RKPD Tahun 2023
				16.	Penetapan P-RKPD Tahun 2023
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	%	93		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data Pembangunan	Dokumen	2	A.	Penyusunan Analisis Ketimpangan Wilayah
				B.	Penyusunan Laporan Kinerja Perekonomian (triwulanan)
				C.	Analisis Pembangunan Daerah
				D.	Penyusunan Bab 2 RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024
				E.	Pengembangan Aplikasi Geoportal
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	92	A.	Pelaksanaan Forum Satu Data Kalimantan Timur
				1.	Identifikasi Daftar Satu Data Kalimantan Timur
				2.	Pembinaan Data Statistik dan Data Spasial
				3.	Penyepakatan Daftar Satu Data Kalimantan Timur



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi		
				4.	Kick Off Meeting Satu Data Kalimantan Timur	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	30	A.	Fasilitasi/Integrasi JIGD Kab/Kota	
				B.	Rapat hasil evaluasi JIGD Kab/Kota	
				C.	Rakor JIGD (Pembinaan Kab/Kota)	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Dokumen	3	A.	FGD Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	
				B.	Penyusunan Buku Profil Pembangunan Daerah	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian rencana Program/Kegiatan yang digunakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	%	80			
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	A.	Fasilitasi Kegiatan TGUP3 Prov. Kaltim	
				B.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	
					1.	Rapat Pendahuluan Tim Evaluasi RPJMD Prov. Kaltim 2019 - 2023 Tahun Ke-5
					2.	Rapat Konsinyasi Pengumpulan Data dan Verifikasi Semester I
					3.	Rapat Penyusunan Laporan Akhir Evaluasi RPJMD
				4.	Penyusunan Laporan Akhir Evaluasi RPJMD	
C.	Sosialisasi Penyusunan Evaluasi RPJPD					
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	A.	Monitoring Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBD dan APBN	
				1.	Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan monitoring lapangan Semester I	
				2.	Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan monitoring lapangan Semester II	



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
				B.	Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur
				1.	Rapat Evaluasi Renja PD
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi	Dokumen	4	A.	Verifikasi kelengkapan fasilitasi RKPD Kab/Kota Tahun 2024
				B.	Pelaksanaan konsultasi fasilitasi RKPD Kab/Kota Tahun 2024
				C.	Penyampaian surat hasil fasilitasi RKPD Kab/Kota
				D.	Pengendalian tindak lanjut hasil fasilitasi RKPD Kab/Kota Tahun 2024
				E.	Verifikasi kelengkapan fasilitasi P-RKPD Kab/Kota Tahun 2023
				F.	Pelaksanaan konsultasi fasilitasi P-RKPD Kab/Kota Tahun 2023
				G.	Penyampaian surat hasil fasilitasi P-RKPD Kab/Kota Tahun 2023
				H.	Pengendalian tindak lanjut hasil fasilitasi P-RKPD Kab/Kota Tahun 2023

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi dan mengarahkan kualitas belanja daerah. Perencanaan yang akurat, berbasis data, ditopang oleh pengetahuan, dan dinamika pembangunan yang mutakhir menjadi awal untuk menjamin bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar dibelanjakan untuk menjawab permasalahan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, program ini memiliki tujuan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan. Hasil dari proses perencanaan perlu dipastikan didukung dengan anggaran yang memadai.

Terdapat tiga kegiatan yang menjadi turunan operasional dari program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan tersebut yakni (1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, (2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, (3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Ketiga kegiatan tersebut bersifat saling berhubungan dari hulu hingga hilir. Proses perencanaan hingga penetapan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai stakeholder (partisipatif) dilaksanakan melalui kegiatan pertama. Selanjutnya, untuk menyusun substansi perencanaan pembangunan daerah yang



berkualitas, dilakukan pengumpulan data serta analisis yang berbasis ilmu pengetahuan, data dan fakta, yang dilaksanakan melalui kegiatan kedua. Untuk memastikan hasil perencanaan diimplementasikan dan memperoleh target yang diharapkan serta tepat sasaran, dilaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pengendalian daerah melalui kegiatan ketiga. Tabel 3.11 menunjukkan hal mendetail terkait sub kegiatan beserta rencana aksi yang disusun untuk menjadi arahan kinerja tahun 2023.

II. Sasaran 2: Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran

Sasaran strategis kedua dari kinerja Bappeda Kaltim berkaitan dengan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan belanja daerah. Kondisi ideal yang diharapkan adalah bahwa hasil perencanaan didukung dengan alokasi belanja yang memadai sesuai kebutuhan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan. Titik krusial inilah yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja perencana di Bappeda Kalimantan Timur, yakni memastikan bahwa belanja daerah telah sesuai atau selaras dengan hasil perencanaan yang telah ditetapkan.

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.12 Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran strategis 2

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	95	100	105,26

Kinerja strategis kedua Bappeda Kaltim tahun 2023 mencapai 105,26%. Berdasarkan klasifikasi kinerja, capaian ini dapat dikategorikan "Sangat Tinggi". Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Bappeda Kaltim untuk memastikan belanja daerah dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah telah berada pada jalur yang tepat. Perbaikan kedepan tentu perlu terus dilakukan agar kualitas perencanaan serta belanja daerah dapat terus meningkat



2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Sas 2)

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja			Keterangan
		2021	2022	2023	
Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	96,97	99,61	100	Terjadi peningkatan dari tahun 2022

Pencapaian kinerja strategis kedua telah berjalan baik dan optimal pada periode perencanaan jangka menengah 2019 – 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi dapat dipertahankan bahkan secara perlahan ditingkatkan.



Gambar 3.8 Koordinasi & Sinkronisasi Sektoral bersama Perangkat Daerah



3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Bappeda 2019 – 2023)

Tabel 3.14 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Sasaran 2)

Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	95	100	Telah melampaui target

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan pembangunan periode jangka menengah 2019 – 2023. Pada akhir periode, sasaran strategis kedua ditargetkan mencapai 95%. Realisasi kinerja pada tahun terakhir ini telah melampaui target, yakni sebesar 100%.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

a. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja

Sasaran strategis kedua menunjukkan kinerja yang baik. Realisasi pada akhir periode perencanaan telah melampaui target yang ditetapkan bahkan ada sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya (tahun 2022). Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja sasaran kedua ini antara lain:

- Meningkatnya kualitas proses pembahasan dan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah serta proses verifikasi anggaran perangkat daerah dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi dan komunikasi yang baik serta efektif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- Ketelitian dalam proses perencanaan, terutama dalam proses analisis rencana kegiatan serta sub kegiatan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah
- Tersedianya aplikasi yang membantu proses kendali keselarasan antara proses perencanaan dan penganggaran



- Peningkatan penerapan Permendagri 86/2017, terutama pada aspek larangan penambahan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan pada tahap penganggaran kecuali terdapat keadaan darurat serta adanya kebijakan nasional
- Adanya atensi KPK melalui Surat Edaran (SE) No. 8 tahun 2021 yang menyatakan bahwa seluruh proses perencanaan harus terintegrasi dengan proses penganggaran serta akan dilaksanakannya pengawasan oleh KPK terhadap seluruh proses perencanaan dan penganggaran
- Hasil Review APIP atas dokumen perencanaan dan penganggaran

b. Solusi yang telah dilakukan (langkah perbaikan yang telah dilakukan)

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mendukung kinerja sasaran kedua antara lain:

- Membuka komunikasi dan meningkatkan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sejak tahap perencanaan, TAPD telah menjadi bagian dari Bappeda Kaltim dalam memberikan pemahaman kepada berbagai stakeholder bahwa dalam proses penganggaran seluruhnya akan mengacu pada dokumen perencanaan. Oleh karena itu, rencana program kegiatan beserta usulan harus dibahas dan terakomodir dalam dokumen perencanaan. Dengan kondisi ini, usulan program, kegiatan, sub kegiatan, serta usulan belanja yang dibahas adalah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan
- Memaksimalkan penggunaan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Penggunaan aplikasi SIPD sangat membantu dalam memastikan bahwa belanja yang akan dianggarkan telah menjadi bagian dari produk proses perencanaan
- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bappeda Kaltim. Meningkatnya pemahaman dan kompetensi SDM menjadi titik penting untuk menjaga substansi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, meningkatnya kompetensi SDM di Bappeda Kaltim dapat membantu dalam memberikan pemahaman kepada berbagai stakeholder mengenai posisi strategis proses perencanaan dan hubungannya dengan proses penganggaran



Gambar 3.9 Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait sinkronisasi proses perencanaan & penganggaran (1)



Gambar 3.10 Koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait sinkronisasi proses perencanaan & penganggaran (2)



- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja
- Menjadikan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kaltim sebagai program yang wajib dilakukan di lingkungan internal organisasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin adanya perbaikan dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan (continuous improvement)
 - Melakukan koordinasi internal untuk meningkatkan pemahaman terkait tugas perencana di dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga meminimalisir kesalahan dalam penganggaran yang terjadi akibat kesalahan perencanaan
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan pada berbagai tingkat pemerintahan berjalan secara selaras dan saling mendukung.

5) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.15 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran (sasaran 2)

Sasaran strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Kinerja anggaran (%)	Tingkat efisiensi (%)
Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur &	105,26%	91,65%	13,61%

Tabel 3.15 Menggambarkan penggunaan sumber dana (alokasi anggaran) untuk mencapai sasaran strategis kedua. Kinerja anggaran adalah sebesar 91,65% dengan capaian kinerja 105,26%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, upaya untuk mencapai keselarasan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 13,61%.



6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran kinerja terkait keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan program/kegiatan/sub. Kegiatan pada bidang perencana di lingkungan Bappeda Kaltim. Bidang-bidang tersebut yakni (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.996.651.000. Tabel 3.16 menyajikan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dilengkapi dengan rencana aksi yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua.

Tabel 3.16 Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan & Rencana Aksi pendukung capaian sasaran strategis kedua

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	95		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	%	100		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	A.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Pemerintahan dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024
				B.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
				C.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2024
				D.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Pemerintahan dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	95		
				E.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2023
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	10	A.	Verifikasi Dokumen RKA Perangkat Daerah terhadap dokumen Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	A.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	A.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Pemerintahan dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024
				B.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
				C.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2024
				D.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Pemerintahan dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
				E.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2023
				F.	FGD Penanggulangan Kemiskinan, pengangguran, stunting dan kesetaraan gender
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	A.	Verifikasi Dokumen RKA



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	95		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	2	B.	Perangkat Daerah terhadap dokumen Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	%	97		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	A.	Rapat Penajaman Arah Pembangunan Kaltim dengan Sekretaris SKPD Lingkup Bidang Perekonomian (Bidang Pertanian, Perikanan, Indagkop, investasi dan pariwisata)
				B.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Perekonomian dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024
				C.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
				D.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2024
				E.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Perekonomian dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
				F.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2023



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	95			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	9	A.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Bidang Pertanian, Perikanan, Indagkop, investasi dan pariwisata)	
				B.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian (Bidang Pertanian, Perikanan, Indagkop, investasi dan pariwisata)	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	A.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian (Bidang Pertanian, Perikanan, Indagkop, investasi dan pariwisata)	
				B.	1.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG 2021
					2.	Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG
					3.	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD PG Regional Tengah dan Timur
				C.	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Nasional Sub Sektor Pertanian dan Perikanan /Asistensi DAK 2021	
				D.	Verifikasi Dokumen RKA Perangkat Daerah terhadap dokumen Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian (Bidang Pertanian, Perikanan, Indagkop, investasi dan pariwisata)	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir	Dokumen	1	A.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	95		
	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			B.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
				C.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2024
				D.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
				E.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2023
				F.	Verifikasi Dokumen RKA Perangkat Daerah terhadap dokumen Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	3	A.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
				B.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Dokumen	1	A.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
				B.	Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs
				1.	Pengumpulan Data Capaian SDGs
				2.	Evaluasi Pelaksanaan SDGs
				3.	Pendampingan Penyusunan SDGs Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
				4.	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Pelaksanaan SDGs di Kalimantan Timur



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	95		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	%	97		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	A.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Infrastruktur dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024
				B.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
				C.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2024
				D.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Bidang Infrastruktur dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
				E.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2023
				F.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Pemukiman
				G.	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Pemukiman
				H.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Pemukiman
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	Perangkat Daerah	2	A.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Infrastruktur dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	95		
Daerah Bidang Infrastruktur	Renstra/Renja Bidang Infrastruktur			B.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
				C.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2024
				D.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Bidang Infrastruktur dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
				E.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2023
				F.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Keciatakaryaan dan Pemukiman
				G.	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Wilayah
				H.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Wilayah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
B.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah				
C.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2024				
D.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Bidang Infrastruktur dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023				
E.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2023				



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	95	
				F. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
				G. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
				H. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

III. Sasaran 3: Meningkatkan kinerja pelayanan BAPPEDA secara internal & eksternal

Sasaran strategis ketiga dari kinerja Bappeda Kaltim berkaitan dengan pelayanan Bappeda Kaltim kepada berbagai *stakeholder* pengguna layanan Bappeda. Proses pengambilan data dilakukan melalui survey menggunakan kuesioner yang tersedia secara online. Responden survey diperoleh dalam berbagai acara/event yang diselenggarakan oleh Bappeda Kaltim, event oleh Pemerintah Provinsi Kaltim maupun tamu dan pengguna layanan lain yang hadir secara langsung di kantor Bappeda Kaltim.



Gambar 3.11 Janji pelayanan Bappeda Kaltim



Gambar 3.12 Form Online Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Bappeda Kaltim yang tersedia di Website Bappeda Kaltim

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.17 Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran strategis 3

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	%	79,55	79,75	100,25

Kinerja strategis ketiga Bappeda Kaltim tahun 2023 mencapai 100,25%. Berdasarkan klasifikasi kinerja, capaian ini dapat dikategorikan "Sangat Tinggi". Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Bappeda Kaltim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan daerah telah berada pada jalur yang tepat. Meskipun capaian masuk kategori sangat tinggi, dibutuhkan strategi agar perbaikan dan peningkatan kinerja kedepan dapat terus dilakukan.



2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.18 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Sasaran 3)

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja			Keterangan
		2021	2022	2023	
Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	%	-	79,60	79,75	Mencapai target dan terdapat peningkatan realisasi.

Pencapaian kinerja strategis ketiga telah berjalan optimal pada periode perencanaan jangka menengah 2019 – 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi dapat dipertahankan bahkan secara perlahan ditingkatkan.



Gambar 3.13 Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Perangkat Daerah sebagai pengguna layanan Bappeda Kaltim



3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Bappeda 2019 – 2023)

Tabel 3.19 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Sas 3)

Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	%	79,55	79,75	Melampaui target yang ditetapkan

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan pembangunan periode jangka menengah 2019 – 2023. Pada akhir periode, sasaran strategis ketiga ditargetkan mencapai 79,55%. Realisasi kinerja pada tahun terakhir ini telah melampaui target, yakni sebesar 79,75%.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

- a. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja
 - o Belanja tepat sasaran, baik pelayanan terhadap kebutuhan kerja (sarana prasarana kerja) personel Bappeda Kaltim maupun upaya peningkatan layanan untuk pihak eksternal. Peningkatan layanan untuk pengguna layanan eksternal meliputi publikasi dan penyediaan informasi serta data perencanaan pembangunan yang termutakhir dan mudah terakses. Hal ini termasuk penggunaan teknologi dan informasi dalam penyebarluasan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder pembangunan serta masyarakat luas.
 - o Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kaltim baik dalam konteks peningkatan kompetensi maupun penguatan kerjasama internal di antara seluruh personel Bappeda Kaltim. Langkah ini dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki reputasi baik untuk kompetensi perencanaan maupun peningkatan keterampilan lainnya. Untuk meningkatkan kepercayaan kerja bersama di antara personel Bappeda Kaltim, dilaksanakan program *capacity building*. Selain itu, dilakukan proses assessment kepada seluruh pegawai non Aparatur Sipil Negara untuk menggali potensi dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Langkah ini dilakukan untuk memetakan kekuatan personel, yang menjadi



bahan pertimbangan dalam melakukan penempatan personel pada bidang-bidang dan sekretariat Bappeda Kaltim

- Proses pertimbangan dalam menentukan jumlah serta karakter responden dalam proses pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Salah satu bahan evaluasi tahun 2023 adalah terkait proses pengisian SKM Bappeda Kaltim. Terjadi peningkatan jumlah responden jika dibandingkan dengan tahun 2022
 - . Kondisi ini baik namun perlu lebih diperdalam terkait karakter responden yang memberi pandangannya terhadap layanan Bappeda Kaltim. Akan diupayakan pertimbangan lebih lanjut mengenai proporsi masyarakat yang memperoleh layanan secara langsung maupun yang tidak secara langsung memperoleh layanan Bappeda Kaltim.
- b. Solusi yang telah dilakukan (langkah perbaikan yang telah dilakukan)
 - Memperluas kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan pengguna layanan Bappeda Kaltim. Tahun 2023, penyebaran kuesioner dilakukan di lebih banyak kesempatan event. Jika tahun sebelumnya penyebaran kuesioner terbatas pada acara yang diadakan oleh Bappeda Kaltim, seperti Konsultasi Publik, Musrenbang, serta tamu kedinasan, tahun 2023 Survey Kepuasan Layanan diperluas yakni dalam *event* yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti pameran pembangunan, pesta rakyat, dan sebagainya.
 - Memperluas jangkauan penyebaran informasi terkait layanan dan kinerja Bappeda Kaltim termasuk capaian-capaian pembangunan daerah. Selain melalui website institusi, penyebaran informasi layanan Bappeda juga dilakukan melalui sosial media serta keikutsertaan dalam berbagai acara pembangunan daerah
 - Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kaltim. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi personel Bappeda yang memberikan pelayanan terhadap produk/output hingga outcome dan sasaran organisasi.
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja
 - Melanjutkan dan meningkatkan program peningkatan kapasitas SDM Bappeda Kaltim, yakni dengan melakukan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang menunjang kinerja dan dapat meningkatkan layanan Bappeda Kaltim. Peningkatan ini dilakukan baik pada aspek kualitas maupun kuantitas.



- o Melakukan pertimbangan lebih lanjut dan strategis dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat agar jumlah responden yang mengikuti survey tergolong representatif dan tepat sasaran, atau proporsional berdasarkan kategori pengguna langsung maupun tidak langsung
- o Melaksanakan pengendalian dengan lebih konsisten untuk memastikan kinerja organisasi sesuai dengan timeline kerja dan hasil kerja tepat mutu serta tepat sasaran.

Beberapa output **utama** dari kinerja organisasi tahun 2023 yang merupakan bahan utama dalam pelayanan kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi BAPPEDA antara lain:

1. Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026
2. Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024
3. Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023
4. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kaltim 2019 – 2023
5. Berita acara konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2045
6. Executive summary & laporan kajian pemetaan karakteristik masyarakat miskin prov.kaltim tahun 2023
7. Laporan tenaga ahli kelembagaan stunting periode 1 Bappeda Prov. Kaltim tahun 2023
8. Kajian identifikasi ketenagakerjaan arahan optimalisasi sektor ketenagakerjaan berdasarkan tipologi karakteristik serapan tenaga kerja terhadap luas pemanfaatan ruang pada sektor unggulan dan non unggulan tahun 2023
9. Kajian perencanaan simpul transportasi tahun 2023
10. Rencana pola penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di provinsi kalimantan timur tahun 2023
11. Rencana pola penanganan kawasan kumuh di Kalimantan Timur tahun 2023
12. Kajian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan penyediaan air baku kaltim tahun 2023
13. Kajian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan penyediaan irigasi teknis kaltim tahun 2023
14. Kajian perencanaan, konektivitas dan aksesibilitas tahun 2023
15. Laporan pendampingan tenaga ahli SDA-LH subbid SDA dan lingkungan hidup



16. Laporan evaluasi rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan timur tahun 2023
17. Laporan dewan daerah perubahan iklim (DDPI) Kalimantan timur tahun 2023
18. Rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) tahun 2024-2030 provinsi Kalimantan timur tahun 2023
19. Laporan pelaksanaan pelayanan internal & progress kinerja Bappeda tahun 2023
20. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2023
21. Laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah (Bidang Infrastruktur & Kewilayahan, Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian & SDA)
22. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah (Bidang Infrastruktur & Kewilayahan, Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian & SDA)

5) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.20 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sasaran 3

Sasaran strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Kinerja anggaran (%)	Tingkat efisiensi (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan BAPPEDA secara internal dan eksternal	Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	100,25	94,83%	5,42%

Tabel 3.20 Menggambarkan penggunaan sumber dana (alokasi anggaran) untuk mencapai sasaran strategis ketiga. Kinerja anggaran adalah sebesar 94,83% dengan capaian kinerja 100,25%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, untuk mengupayakan layanan organisasi baik internal maupun eksternal, terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan, yakni 5,42%.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran kinerja terkait pelayanan organisasi baik secara internal maupun eksternal utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan program/kegiatan/sub. Kegiatan pada



Sekretariat Bappeda Kaltim melalui "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi". Pelaksanaan program ini memperoleh alokasi sebesar Rp39.509.125.107.

Tabel 3.21 menyajikan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dilengkapi dengan rencana aksi yang mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga.

Tabel 3.21 Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan & Rencana Aksi pendukung capaian sasaran strategis ketiga

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda	%	90		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses	%	95		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	A.	Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda 2024-2026
				B.	Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Bappeda 2024-2026
				B.	Penetapan Renstra Bappeda 2024-2026
				C.	Penyusunan Ranwal Renja Bappeda Thn. 2024
				D.	Penyusunan Rancangan Renja Bappeda Thn. 2024
				E.	Penyusunan Ranhir Renja Thn. 2024
				F.	Penetapan Renja Bappeda Thn. 2024
				G.	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Thn. 2023
				H.	Penyusunan Ranhir Perubahan Renja Thn. 2023
				I.	Penetapan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	A.	Penyusunan Perubahan RKA Thn. 2023
				B.	Penyusunan RKA Thn. 2024
Koordinasi Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	A.	Penyusunan Perubahan DPA Thn. 2023
				B.	Penyusunan DPA Thn. 2024



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	A.	Penyusunan LKjiP Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2022
				B.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2023
				C.	Penyusunan Casacading Kinerja Bappeda Tahun 2023
				D.	Penyusunan Rencana Aksi Bappeda Tahun 2023
				E.	Penginputan realisasi belanja Bappeda pada Aplikasi TEPPA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	A.	Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renja Bappeda Tahun 2023
				B.	Penyusunan bahan evaluasi Renstra Bappeda Tahun 2019-2023
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	%	96		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90	A.	Identifikasi data kepegawaian berdasarkan SK, Kenpa, dll
				B.	Perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN berdasarkan hasil identifikasi
				C.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	A.	Identifikasi data kepegawaian berdasarkan Jabatan Penatausahaan Keuangan (KPA, PPTK, Bendahara, dll)
				B.	Penyusunan SK Tim KPA, PPTK dan Pejabat Penatausaha Keuangan
				C.	Pengadministrasian dan pertanggungjawaban keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	A.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	50		



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	27	A.	Mengikuti Bimbingan Teknis
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik	%	95		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	A.	Penyediaan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	A.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	A.	Penyediaan logistik kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	A.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	A.	Penyediaan Bahan Bacaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1038	A.	Penyediaan fasilitasi tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	A.	Menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	A.	Penyediaan dukungan pelaksanaan SPBE
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Bulan	12		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	6	A.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	%	95		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	A.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	A.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Uraian Rencana Aksi	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	A.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	%	90		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	A.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	69	A.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	A.	Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit	30	A.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	A.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Unit	4	A.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

D. Perbandingan dengan kinerja provinsi & Perbaikan kinerja organisasi

a) Beberapa aspek perbandingan kinerja dengan kinerja level provinsi

Realisasi dan capaian kinerja antara perangkat daerah (Bappeda Kaltim) dengan kinerja pada level provinsi dapat dilakukan jika terdapat indikator kinerja yang sepadan. Dalam hal ini, perbandingan kinerja dapat dilakukan pada dua aspek, yakni nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Realisasi Anggaran.

Kinerja yang diukur berdasarkan penggunaan anggaran menunjukkan bahwa baik Bappeda Kaltim maupun Pemprov Kaltim realisasinya di atas 91%. Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 mencapai 93,27%. Sementara itu, realisasi anggaran Bappeda Kaltim tahun 2023 mencapai 94,51%.



Dari sisi akuntabilitas kinerja, Tahun 2023, Pemprov Kaltim memperoleh nilai SAKIP sebesar 77,89 dengan predikat akuntabilitas kinerja BB. Sementara itu, nilai SAKIP Bappeda Kaltim tahun 2023 adalah 76,4 dengan predikat kinerja BB. Dalam konteks kinerja Pemprov dan penilaian SAKIP, Bappeda merupakan bagian dari klaster utama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2024 (penilaian kinerja 2023), Bappeda Kaltim ditargetkan menjadi salah satu perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja A (memuaskan).

b) Perbaikan Kinerja Organisasi

Identifikasi dan analisis kinerja Bappeda tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan pada beberapa aspek, terutama aspek yang memiliki strategis. Tugas dan fungsi utama Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah telah menunjukkan kinerja optimal dan berada pada jalur sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada sasaran strategis pertama, terdapat unsur atau faktor di luar kendali Bappeda yang perlu dipertimbangkan kembali upaya pencapaiannya. Pada sasaran strategis kedua, kinerja Bappeda menunjukkan konsistensi untuk mempertahankan capaian baik tahun sebelumnya bahkan meningkatkan capaian tersebut. Peningkatan kinerja secara gradual tampak pada sasaran strategis kedua. Tahun 2022, realisasi kinerja adalah 99,61% dan tahun 2023 Bappeda berhasil mencapai kinerja 100%. Dari sisi pelayanan yang diberikan oleh organisasi, realisasi mencapai target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dari tahun 2022. Layanan organisasi yang diberikan pada level sasaran strategis mencakup pihak yang lebih luas. Target layanan tidak hanya diberikan pada internal Bappeda namun juga pihak eksternal atau stakeholders/pemangku kepentingan yang lebih luas.

Peningkatan kinerja yang dicapai Bappeda tidak terlepas dari **tindak lanjut terhadap evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja organisasi**. Pasca hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Bappeda diterima pada Bulan Oktober 2023, pemantauan kinerja hingga level staf dilakukan setiap bulan. Hal ini untuk memastikan dua hal, yakni rencana aksi telah terlaksana dan progress kerja yang ditunjukkan melalui nilai realisasi anggaran dan realisasi substansi (fisik) pekerjaan memiliki progress yang baik dan dapat tercapai sesuai target.



Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabel dalam kinerja organisasi memegang peranan penting untuk memastikan bahwa kinerja organisasi yang telah baik atau berada pada jalur yang tepat dapat dipertahankan, hal-hal yang menghambat kinerja dapat diidentifikasi dan dicari solusinya, serta peningkatan kinerja organisasi dapat dicapai. Dengan adanya pemantauan atau kendali secara periodik, dapat ditemukan titik-titik kuat organisasi yang dapat mendukung kinerja serta titik-titik lemah yang perlu diberi perhatian agar kinerja dapat meningkat dan mengalami perbaikan. Merefleksikan dari perbaikan kinerja yang dicapai pada tahun 2023, Bappeda Kaltim berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari proses kerja serta menindaklanjuti evaluasi yang dihasilkan dari berbagai tahap evaluasi dan penilaian kinerja.



NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Oktober 2023
Waktu : 13.30 s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Proppda
Pengantar Rapat : Kepala Bappeda Prov. Kaltim
Peserta : Sekretaris Bappeda Prov. Kaltim
- Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia
- Kepala Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam
- Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Kasubbag Litum
- Kasubbag Perencanaan Program
- Staf Teknis dan Pengelola Keuangan
Perihal : Rapat Evaluasi Kegiatan Bulan September dan Rencana Kerja Bulan Oktober Tahun Anggaran 2023

Hasil Rapat:

- Identifikasi belanja – belanja yang akan dilakukan pengeseran maupun akan dibatalkan/bekas.
- Membuat kebutuhan alokasi belanja untuk tunggangan TPP PNS (Tambah Perghasilan berdasarkan beban kerja PNS) setelah mendapatkan alokasi penambahan sebesar 65%.
- Tempat jasa dana hasil perhitungan yang tidak terserap agar dikembalikan ke Kas Daerah.
- Berikut pagu anggaran, target realisasi dan realisasi anggaran Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan bidang per tanggal 30 September 2023.

BIDANG	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	TARGET PROPOSAL SEPTEMBER	Komitmen Pengeseran/ Bekas/ RPL	Presentase Komitmen (%)	Realisasi Per 30 September 2023	Presentase Realisasi (%)
SEKRETARIAT	39.873.443.157	31.286.844.179	21.854.104.740	58,08	26.874.842.115	52,87
PERPO	12.568.752.200	11.122.895.126	9.839.429.851	88,86	7.394.189.347	59,38
PMW	3.263.763.000	3.322.969.800	2.347.910.319	70,39	2.362.894.768	71,43
PSDA	7.724.446.500	8.847.809.523	4.179.882.522	54,11	3.058.309.764	39,39
MPRABAWL	2.887.245.500	2.820.471.500	2.264.587.760	79,18	1.910.780.760	52,53
TOTAL	66.057.879.357	54.882.511.228	38.966.824.961	58,99	34.977.820.674	52,95

- Faktor Penghambat
 - Melunggu Tanggal Penetapan Belanja APBD-P 2023 yang direncanakan pada minggu ke-11 Bulan Oktober
 - Faktor Pendukung
 - PPK mengonkan ke Grup WA TU Pimpinan terhadap realisasi dan parir yang telah diberikan subbagian keuangan.
 - Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas (terkait kelengkapan perjalanan dinas dalam rangka SPJ) di sekretariat
 - Rencana penyerapan anggaran direncanakan untuk dipatu setiap minggu pencaibannya
- Rencana Kerja Bulan Oktober
 - Bidang Sekretariat**
Rencana kerja kegiatan Sekretariat sampai dengan Bulan Oktober 2023 Rp.23.801.169.279,- atau 59,99%. Belanja bulan Oktober direncanakan sebesar Rp2.829.327.163 dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Bahan ATK
 - Belanja Bahan Kertas dan Cover
 - Belanja Bahan Komputer
 - Belanja Makan Minum Rapat
 - Belanja Tagihan Listrik, Air, Telepon, Internet
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 - Belanja Langganan Jurnalistik Kabar/Majalah
 - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
 - Belanja jasa konsultasi Perencanaan arsitektur
 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung/Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor
 - Belanja Bahan Anggitan Lainnya
 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi
 - Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
 - Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
 - Belanja Bahan Bakar dan Palumas
 - Belanja Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perjanjin
 - Belanja Pemeliharaan Alat Anggutan Darat Bermotor Penumpang
 - Belanja Diklat RPL/PPD

6. Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, maka rencana realisasi Bappeda Prov. Kaltim pada bulan Oktober sebesar Rp. 42.296.128.191,- atau 64,03 % dengan komitmen penyerapan masing – masing bidang sebagai berikut:

Tabel Komitmen Oktober

Bidang	Pagu Anggaran Perubahan	Target Provisi Bulan Oktober (80%)	Realisasi Perencanaan S.d Desember 2023	Rencana Penyerapan Oktober 2023	Presentase Realisasi	Sisa Dana
SEKRETARIAT	39.873.443.157	35.706.098.841	23.801.189.279	2.826.327.163	59,99	15.872.273.879
PERPO	12.568.752.200	11.311.876.960	6.980.172.911	1.895.984.264	71,45	3.588.879.289
PMW	3.263.763.000	2.862.424.700	2.072.628.765	350.000.000	68,42	3.011.764.235
PSDA	7.724.446.500	6.982.021.600	4.402.789.692	1.346.429.928	58,99	3.332.856.608
MPRABAWL	2.887.245.500	2.386.592.900	2.442.387.555	829.596.762	84,52	446.987.845
TOTAL	66.057.879.357	59.451.903.321	42.296.128.191	7.318.368.117	64,03	25.761.542.166

NO.	NAMA	BIDANG/JABATAN	Tanda Tangan
1.	Saur Prasanto T	Sekretaris	
2.	Aldino Rinaldi Anif	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
3.	Mipoyo	Kabid. Perencanaan Dan Pembangunan Manusia	
4.	Wahyu Gekut Purboyo	Kabid. Perencanaan Dan Sumber Daya Alam	
5.	Baharq Hazam	Kabid. Infrastruktur Dan Kewilayahan	

Samarinda, 5 Oktober 2023
Mengetahui,
Kepala,

Yusliando

Gambar 3.14 Contoh pemantauan rencana aksi & komitmen kinerja bulanan



Gambar 3.15 Penyebarluasan informasi pembangunan & kegiatan Bappeda Kaltim di halaman INSTAGRAM Bappeda Kaltim @bappeda_kaltim



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2023 disusun berdasarkan pengukuran capaian strategis organisasi sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis tahun 2019 – 2023. Tahun 2023, realisasi kinerja anggaran Bappeda Provinsi Kaltim mencapai 94,51%. Dari aspek realisasi target program/kegiatan yang mendukung target sasaran strategis, kinerja Bappeda Kaltim mencapai 92,98%. Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek-aspek sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar capaian kinerja Bappeda tahun 2023 dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** (di atas 91%). Uraian capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pertama, yakni terkait “Program prioritas yang mencapai target” menunjukkan capaian sebesar 93,06%.
2. Sasaran kedua, yakni terkait Program/Kegiatan pada seluruh perangkat daerah yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam dokumen anggaran menunjukkan capaian sebesar 105,26%
3. Sasaran ketiga, yakni terkait layanan yang diberikan Bappeda Kaltim baik secara internal maupun eksternal menunjukkan capaian sebesar 100,25%
4. Dari ketiga sasaran tersebut, rata-rata capaian organisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 99,52%
5. Realisasi anggaran Bappeda Kaltim tahun 2023 adalah sebesar 94,51% sehingga secara keseluruhan (perangkat daerah), terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,01%

Selain hal-hal berkaitan dengan evaluasi capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah, hasil evaluasi penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga menjadi poin perhatian pimpinan dalam mengarahkan kinerja organisasi. Pasca diterimanya hasil evaluasi dari Inspektorat Kalimantan Timur pada Bulan Oktober 2023, Bappeda Kaltim melakukan upaya perbaikan, yakni dengan melaksanakan pemantauan/pengendalian kinerja dengan lebih konsisten, penuh komitmen, serta yang memenuhi prinsip akuntabel. Salah satunya adalah melaksanakan kendali kinerja personel dalam organisasi yang dipantau tidak hanya



tiap tiga bulan (triwulan) namun dilakukan tiap bulan. Mengingat sistem yang dimiliki oleh Pemprov Kaltim pada tahun 2023 belum dapat mengakomodir pemantauan bulanan, maka upaya perbaikan melalui pemantauan bulanan dilakukan secara manual. Pemanfaatan teknologi tetap diimplementasikan yakni dengan menggunakan sistem ruang kerja bersama secara online (cloud based file management system). Penggunaan mekanisme ini memudahkan pimpinan untuk mengetahui bidang-bidang yang telah melakukan pemantauan kinerja bulanan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja.

Upaya perbaikan yang dilakukan ini perlahan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari peningkatan kinerja organisasi ditinjau dari penggunaan anggaran untuk program/kegiatan yang telah diagendakan serta rata-rata capaian kinerja. Pada tahun 2022, rata-rata capaian kinerja Bappeda Kaltim adalah sebesar 89,71% dengan realisasi anggaran sebesar 88,87%. Setelah dilakukan perbaikan melalui penerapan hasil evaluasi, utamanya evaluasi terkait akuntabilitas, kinerja Bappeda Kaltim meningkat. Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, tahun 2023 rata-rata capaian kinerja Bappeda Kaltim mencapai 99,52% dengan realisasi anggaran sebesar 94,51%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata capaian sebesar 11,98% dan peningkatan realisasi anggaran sebesar 6,34%.

B. Upaya Perbaikan Kedepan

1. Menjadikan hasil evaluasi sebagai salah satu aspek penting dalam perbaikan kinerja, terutama kinerja strategis organisasi
2. Memperkuat pemantauan kendali pelaksanaan program/kegiatan agar memiliki progress yang baik, tepat sasaran, menjalankan prinsip yang akuntabel serta prinsip pemerintahan yang baik (good governance) lainnya
3. Mengimplemetasikan pemantauan perjanjian kinerja hingga level staf dengan durasi atau periode waktu bulanan dengan memanfaatkan teknologi agar dapat lebih efisien serta konsisten
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan mitra kerja terutama agar kinerja strategis organisasi sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana strategis dapat mencapai target yang ditetapkan
5. Memperkuat kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Bappeda kaltim untuk mendukung kinerja organisasi

LAMPIRAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2.121.286.644.382	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2.111.006.047.091	86,3	101,53	1.764.510.682.259	83,18	86,3	101,53	1.764.510.682.259	83,59
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11 %	34.642.303.128	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11 %	34.642.303.128	11,98	108,91	32.730.480.057	94,48	11,98	108,91	32.730.480.057	94,48
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %	26.085.000.000,00	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %	26.085.000.000,00	1,74	174,00	25.635.141.278,00	98,28	1,74	174,00	25.635.141.278,00	98,28
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100 %	231.652.817.964	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100 %	224.721.476.444	100	100,00	208.811.603.144	90,14	100	100,00	208.811.603.144	92,92
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50 %	5.465.364.672	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50 %	5.465.364.672	70	140,00	4.316.043.475	78,97	70	140,00	4.316.043.475	78,97
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4 Kab/Kota	6.861.999.000	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4 Kab/Kota	5.161.999.000	6	150,00	4.283.096.714	62,42	6	150,00	4.283.096.714	82,97
	Jumlah Kab/Kota yang Melakukan PHBS	3 Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota yang Melakukan PHBS	3 Kab/Kota		6	200,00						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1.700.000.000	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1.700.000.000	1	100,00	1.689.124.915	99,36	1	100,00	1.689.124.915	99,36
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Desa Berkembang	30 Desa	34.298.413.190	Desa Berkembang	30 Desa	34.298.413.190	30	100,00	32.547.017.292	94,89	30	100,00	32.547.017.292	94,89
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	45 Desa	7.699.132.300	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	45 Desa	7.699.132.300	45	100,00	7.164.084.923	93,05	45	100,00	7.164.084.923	93,05
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	2.198.359.800	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	2.198.359.800	89	127,06	1.921.990.201	87,43	88,94	127,06	1.921.990.201	87,43
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	3.005.519.600	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	3.005.519.600	27,5	88,71	2.429.352.388	80,83	27,5	88,71	2.429.352.388	80,83
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1.292.370.000	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1.187.370.000	520	66,92	1.126.641.699	87,18	520	66,92	1.126.641.699	94,89
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		74,78	74,78			74,78	74,78		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	17.046.409.700	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	16.127.071.800	117,72	117,72	14.565.568.846	85,45	117,72	117,72	14.565.568.846	90,32
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	1.671.425.175	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	1.671.425.175	-25	-501,80	1.627.880.804	97,39	-25,09	-501,80	1.627.880.804	97,39
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	3 industri	1.958.039.000	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	3 industri	1.958.039.000	4	133,33	1.929.378.779	98,54	4	133,33	1.929.378.779	98,54

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %	42.247.243.130	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %	110,21	134,40	39.249.999.706	92,91	110,21	134,40	39.249.999.706	95,74	
	Jumlah produksi padi	289846 Ton		Jumlah produksi padi	289846 Ton	215290	74,28			215290	74,28			
	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	249 Jumlah		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	249 Jumlah	285	114,46			285	114,46			
	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali		Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali	50	100,00			50	100,00			
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	292383 Ton		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	292383 Ton	352160,53	120,44			352160,53	120,44			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	8500 Ha	2.802.118.570	Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	8500 Ha	8500	100,00	2.644.699.914	94,38	8500	100,00	2.644.699.914	94,38	
	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit		Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit	1	100,00			1	100,00			
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit	7	100,00			7	100,00			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koperasi yang dibina	4 Lembaga	5.445.100.400	Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koperasi yang dibina	4 Lembaga	4	100,00	5.374.904.520	98,71	4	100,00	5.374.904.520	98,71	
	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	441 Orang/Lembaga		Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	441 Orang/Lembaga	546	123,81			546	123,81			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	22 %	13.042.871.695	Angka Kelahiran Sapi	22 %	12.942.071.695	22	100,27	12.422.896.770	95,25	22	100,27	12.422.896.770	95,99
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Minimanch yang teregister	30 Unit	5.309.353.900	Jumlah Minimanch yang teregister	30 Unit	5.309.353.900	30	100,00	5.288.661.726	99,61	30	100,00	5.288.661.726	99,61
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	18313874.25 Ton	7.122.478.500	Produksi komoditas perkebunan	18313874.25 Ton	7.122.478.500	20.801.100	113,58	6.851.745.460	96,20	20.801.100	113,58	6.851.745.460	96,20
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok/Ha	9.053.510.000	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok/Ha	9.053.510.000	33	110,00	8.324.913.700	91,95	33	110,00	8.324.913.700	91,95
	Luas Kebun yang dibangun	1500674 ha		Luas Kebun yang dibangun	1500674 Ha		1.497.368	99,78			1.497.368	99,78		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.04 Juta Ton CO2eq	5.081.550.200	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.04 Juta Ton CO2eq	5.081.550.200	8,59	212,62	5.000.043.084	98,40	8,59	212,62	5.000.043.084	98,40
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	1.247.873.900	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	1.247.873.900	35	100,00	1.233.298.575	98,83	35	100,00	1.233.298.575	98,83
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	4.002.247.100	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	#REF!	1	100,00	3.893.699.032	97,29	1	100,00	3.893.699.032	97,29
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.90 Ha	6.492.268.400	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.90 Ha	6.492.268.400	293030,79	98,40	6.225.211.732	95,89	293030,79	98,40	6.225.211.732	95,89
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178961 ton	7.273.735.065	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178961 ton	7.273.735.065	179408	100,25	6.914.006.792	95,05	179408	100,25	6.914.006.792	95,05
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182730 ton	36.610.615.500	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182730 ton	30.909.715.500	182946	100,12	27.353.647.505	74,72	182946	100,12	27.353.647.505	88,50
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Jenis	3.567.233.900	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Jenis	2.774.633.900	4	100,00	2.692.040.608	75,47	4	100,00	2.692.040.608	97,02

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5050000 M3	42.880.172.281	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5050000 M3	45.380.172.281	5549203,21	109,89	38.053.144.588	88,74	5549203,2	109,89	38.053.144.588	83,85
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	800 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		1078	134,75			1078	147,67		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	31.406.166.792	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	31.406.166.792	32441	101,38	29.343.229.867	93,43	32441	101,38	29.343.229.867	93,43
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	6 Hari	3.724.370.000	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	6 Hari	3.724.370.000	10	33,33	3.493.553.516	93,80	10	33,33	3.493.553.516	93,80
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	3.575.025.600	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	3.575.025.600	100	100,00	2.422.036.402	67,75	100	100,00	2.422.036.402	67,75
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583.040.000	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583.040.000	9	93,00	581.817.900	99,79	9,3	93,00	581.817.900	99,79
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	3 %	721.750.000	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	3 %	613.700.000	2,50	83,33	608.289.500	84,28	2,50	83,33	608.289.500	99,12
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	10 %	2.371.250.000	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	10 %	3.212.032.415	3	30,00	3.183.230.803	134,24	3	30,00	3.183.230.803	99,10
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	6.303.672.860	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	10.939.562.437	3	100,00	10.281.325.420	93,98	3	100,00	10.281.325.420	93,98
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23.53 %	2.000.000.000	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23.53 %	8.105.824.000	23,53	100,00	8.085.493.278	112,09	23,53	100,00	8.085.493.278	99,75
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	342 kasus	16.328.247.140	Jumlah Lakalantas	342 kasus	16.328.247.140	162	152,63	15.660.218.958	95,91	162	152,63	15.660.218.958	95,91
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5.733.228.500	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5.733.228.500	87	98,86	5.629.254.336	98,19	87	98,86	5.629.254.336	98,19
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	78 %	167.044.363.607	Persentase Capaian Layanan SDA	78 %	180.044.363.606	92,33	118,37	159.547.226.409	95,51	92,33	118,37	159.547.226.409	88,62
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68 %	32.020.221.608	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68 %	41.495.427.368	73,92	108,71	35.000.747.771	109,31	73,92	108,71	35.000.747.771	84,35
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	29.086.048.826	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	29.086.048.826	3977,7	115,13	21.103.521.952	72,56	3977,7	115,13	21.103.521.952	72,56
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	1.699.152.638.583	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	2.195.394.894.982	79,19	101,53	1.976.580.133.758	116,33	79,19	101,53	1.976.580.133.758	90,03
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 indeks	24.093.527.900	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 indeks	24.093.527.900	1	100,00	21.807.005.978	90,51	1	100,00	21.807.005.978	90,51
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69681 Unit	79.015.391.469	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69681 Unit	78.973.864.461	68552	101,62	74.529.985.007	94,32	68552	101,62	74.529.985.007	94,37

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	8.4%	5.795.245.500	Persentase Pemanfaatan EBT	8.4%	5.795.245.500	11,44	136,19	5.581.072.328	96,30	11,44	136,19	5.581.072.328	96,30
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1200000 KK	60.248.834.460	Jumlah KK Berlistrik	1200000 KK	60.248.834.460	1255013	104,58	57.822.634.877	95,97	1255013	104,58	57.822.634.877	95,97
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.85 Indeks	8.441.724.750	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.85 Indeks	8.441.724.750	52,64	97,75	8.087.607.007	95,81	52,64	97,75	8.087.607.007	95,81
	Indeks kualitas udara (IKU)	89.21 Indeks		Indeks kualitas udara (IKU)	89.21 Indeks		89,64	100,48			89,64	100,48		
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.91 Indeks		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.91 Indeks		83,86	104,94			83,86	104,94		
	Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.66 Indeks		Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.66 Indeks		81,36	97,25			81,36	97,25		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	27.372.979.700	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	38.777.112.260	100	100,00	38.247.872.677	139,73	100	100,00	38.247.872.677	98,64
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pengamanan dan Layanan Informasi	85 %	19.579.510.680	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pengamanan dan Layanan Informasi	85 %	19.579.510.680	85	100,00	18.390.102.338	93,93	85	100,00	18.390.102.338	93,93
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81 %	7.065.124.500,00	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81 %	6.529.914.000,00	97,3	120,12	5.622.942.081	79,59	97,3	120,12	5.622.942.081	86,11
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97 %		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97 %		100	103,09			100	103,09		
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89 %		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89 %		100	112,36			100	112,36		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	13.690.565.500,00	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	13.476.283.900	100	105,26	11.884.352.644	86,81	100	105,26	11.884.352.644	88,19

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	3,005,519,600	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	3,005,519,600	27.5	88.71	2,429,352,388	80.83	27.5	88.71	2,429,352,388	80.83
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1,292,370,000	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1,187,370,000	520	66.92	1,126,641,699	87.18	520	66.92	1,126,641,699	94.89
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		74.78	74.78			74.78	74.78		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	1,671,425,175	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	1,671,425,175	-25	-501.80	1,627,880,804	97.39	-25.09	-501.80	1,627,880,804	97.39
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi padi	289846 Ton	42,247,243,130	Jumlah produksi padi	289846 Ton		215290	74.28	39,249,999,706	92.91	215290	74.28	39,249,999,706	95.74
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Luas Kebun yang dibangun	1500674 ha	9,053,510,000	Luas Kebun yang dibangun	1500674 Ha	9,053,510,000	1,497,368	99.78	8,324,913,700	91.95	1,497,368	99.78	8,324,913,700	91.95
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.90 Ha	6,492,268,400	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.90 Ha	6,492,268,400	293030.79	98.40	6,225,211,732	95.89	293030.79	98.40	6,225,211,732	95.89
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	6 Hari	3,724,370,000	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	6 Hari	3,724,370,000	10	33.33	3,493,553,516	93.80	10	33.33	3,493,553,516	93.80
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583,040,000	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583,040,000	9	93.00	581,817,900	99.79	9.3	93.00	581,817,900	99.79
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	3 %	721,750,000	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	3 %	613,700,000	2.50	83.33	608,289,500	84.28	2.50	83.33	608,289,500	99.12
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	10 %	2,371,250,000	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	10 %	3,212,032,415	3	30.00	3,183,230,803	134.24	3	30.00	3,183,230,803	99.10
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5,733,228,500	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5,733,228,500	87	98.86	5,629,254,336	98.19	87	98.86	5,629,254,336	98.19
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.85 Indeks	8,441,724,750	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.85 Indeks	8,441,724,750	52.64	97.75	8,087,607,007	95.81	52.64	97.75	8,087,607,007	95.81
	Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.66 Indeks		Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.66 Indeks		81.36	97.25			81.36	97.25		

RUMUS PERHITUNGAN CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA 2023

BIDANG	URAIAN	RKPD	APBD	KONSISTEN	INKONSISTEN
SELURUH	Program	190	190	190	0
	Kegiatan	570	570	570	0
PPM	Program	93	93	93	0
	Kegiatan	297	297	297	0
EKOSDA	Program	78	78	78	0
	Kegiatan	225	225	225	0
INFRASWIL	Program	19	19	19	0
	Kegiatan	48	48	48	0

Capaian Konsistensi Bappeda
**Jumlah Program/Kegiatan
 dalam dokumen Anggaran /
 Jumlah Program/Kegiatan
 dalam dokumen Perencanaan x
 100%**

100,00

Capaian Konsistensi PPM 100,00

Capaian Konsistensi EkoSDA 100,00

Capaian Konsistensi Infraswil 100,00

Penjabaran Program Berdasarkan Perangkat Daerah APBD Perubahan

Kode	Perangkat Daerah	Jumlah Program	
		RKPD	APBD
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	9
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	5	5
1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	15	15
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3
8.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	6	6
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	8
2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	12
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	8	8
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	10	10
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5	5
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	4	4
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15	15
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4	4
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	4	4
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	6	6
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	5	5
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perkebunan	6	6
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	6
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	5	5
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	5
4.01.0.00.0.00.03.0000	Sekretariat Daerah	8	8
4.02.0.00.0.00.04.0000	Sekretariat DPRD	2	2
5.07.5.07.5.07.05.0000	Badan Penghubung Provinsi	2	2
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	3	3
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah	3	3
5.02.5.02.5.02.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	2	2
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	2	2
Total		190	190

Uraian Capaian	RKPD	APBD
Capaian Konsistensi PPM	93	93
Capaian Konsistensi EkoSDA	78	78
Capaian Konsistensi Infraswil	19	19

Penjabaran Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Perubahan

Kode	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	
		RKPD	APBD
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22	22
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	20	20
1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	28	28
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	11	11
8.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	13
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	15	15
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21	21
2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24	24
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	22	22
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	19	19
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11	11
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	20	20
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	13
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	29	29
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	13
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	14	14
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	13	13
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	22	22
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	13	13
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perkebunan	15	15
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23	23
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	21	21
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21	21
4.01.0.00.0.00.03.0000	Sekretariat Daerah	30	30
4.02.0.00.0.00.04.0000	Sekretariat DPRD	18	18
5.07.5.07.5.07.05.0000	Badan Penghubung Provinsi	8	8
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	9	9
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13	13
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah	12	12
5.02.5.02.5.02.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15	15
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	10	10
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	11
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	11	11
Total		570	570

Uraian Capaian	RKPD	APBD
Capaian Konsistensi PPM	297	297
Capaian Konsistensi EkoSDA	225	225
Capaian Konsistensi Infrasil	48	48

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN (TAHUN 2023) Triwulan IV									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
85	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
86	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
88	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
89	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
90	4	4	3	3	4	4	3	4	4	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
92	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
93	3	4	4	3	3	3	3	4	4	
94	3	4	4	3	3	4	3	3	3	
95	4	3	3	3	3	3	3	3	4	
96	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
97	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
100	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
101	4	4	4	3	3	2	2	3	3	
102	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
103	3	4	4	3	3	3	2	3	3	
104	3	4	4	2	4	3	3	3	3	
105	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
106	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
107	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
108	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
109	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
110	4	4	4	3	4	4	3	2	4	
111	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
112	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
113	3	3	3	2	3	3	3	2	3	
114	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
115	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
116	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
117	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
118	3	4	3	3	3	4	2	3	3	
119	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
120	3	3	3	2	3	3	2	2	3	
121	4	3	4	3	3	3	3	3	3	
122	3	3	3	2	3	2	3	3	3	
123	3	4	3	3	4	4	2	3	4	
124	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
125	3	3	3	3	3	2	3	3	3	
126	4	4	3	3	4	4	2	3	3	
127	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
128	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
129	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
130	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
131	3	3	3	3	3	4	3	4	3	
132	3	3	3	2	3	3	2	3	3	

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN (TAHUN 2023) Triwulan IV									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
133	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
134	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
135	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
136	4	4	4	3	4	4	2	4	4	
137	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
138	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
139	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
140	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
141	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
142	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
143	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
144	4	4	3	3	4	4	2	3	4	
145	3	4	3	3	3	3	2	3	3	
146	4	4	4	3	3	3	3	4	4	
147	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
148	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
149	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
150	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
151	3	3	4	3	3	4	3	4	3	
152	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
153	3	3	3	3	3	3	2	2	3	
154	4	3	3	2	3	3	3	2	3	
155	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
156	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
157	3	3	2	3	3	3	2	3	3	
158	3	3	3	2	4	2	2	2	2	
159	3	3	3	2	3	2	3	3	3	
160	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
161	4	4	4	3	4	4	2	4	4	
162	3	3	4	2	3	3	2	4	3	
163	4	4	4	3	4	3	3	3	3	
164	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
165	4	3	3	3	3	3	3	4	4	
166	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
167	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
168	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
169	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
170	4	3	4	3	3	3	2	3	4	
171	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
172	3	3	3	3	3	3	2	3	3	
173	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
174	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
175	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
176	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
177	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
178	3	3	4	2	3	4	3	3	3	
179	4	4	4	3	3	4	3	4	4	
180	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
181	3	3	3	3	3	3	2	3	3	
182	4	4	4	3	4	4	2	4	4	

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN (TAHUN 2023) Triwulan IV									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
183	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
184	4	4	4	3	4	4	2	3	3	
185	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
186	4	3	3	2	3	3	3	3	3	
187	3	3	3	2	3	2	2	3	3	
188	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
189	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
190	3	4	3	3	4	3	2	4	3	
191	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
192	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
193	3	4	4	3	3	3	3	3	3	
194	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
195	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
196	4	4	3	3	4	4	3	4	4	
197	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
198	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
199	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
201	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
202	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
203	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
204	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
205	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
206	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
207	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
208	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
209	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
210	3	4	4	3	3	4	3	3	4	
211	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
212	3	4	3	3	4	4	3	3	3	
213	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
214	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
215	4	4	3	3	3	3	3	3	3	
216	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
217	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
218	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
219	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
220	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
221	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
222	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
223	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
224	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
225	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
226	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
227	4	4	4	3	4	4	3	3	3	
228	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
229	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
230	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
231	3	4	4	3	4	4	3	4	4	
232	4	3	4	2	3	3	2	3	3	

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN (TAHUN 2023) Triwulan IV									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
233	4	4	3	2	4	4	3	4	4	
234	4	4	4	3	4	4	2	4	4	
235	4	4	4	3	4	4	3	3	3	
236	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
237	4	4	4	3	4	4	2	3	3	
238	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
239	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
240	4	3	4	2	3	3	2	3	4	
241	3	3	2	2	3	3	3	2	3	
242	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
243	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
244	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
245	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
246	3	3	3	2	3	3	2	3	4	
247	3	4	3	3	4	4	3	4	4	
248	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
249	3	3	3	2	3	3	3	2	2	
250	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
251	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
252	3	4	4	3	4	4	3	3	3	
253	3	4	3	2	3	3	2	3	3	
254	3	3	3	3	3	3	2	3	3	
255	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
256	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
257	3	3	3	3	3	3	2	3	3	
258	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
259	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
260	3	3	3	2	3	2	3	3	3	
261	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
262	4	4	4	3	4	4	2	4	3	
263	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
264	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
265	3	3	3	2	4	3	3	3	3	
266	3	3	3	3	4	4	2	3	3	
267	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
268	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
269	3	3	4	3	3	3	2	4	3	
270	4	3	4	2	3	3	2	3	3	
271	3	3	4	2	3	4	3	3	3	
272	3	3	3	2	4	4	2	3	3	
273	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
274	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
275	3	3	3	2	4	2	3	3	3	
276	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
277	3	3	3	3	3	4	3	3	4	
278	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
279	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
280	4	4	4	3	4	4	2	4	4	
281	3	3	4	3	2	3	2	3	3	
282	4	4	4	3	4	4	3	4	4	

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN (TAHUN 2023) Triwulan IV									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
283	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
284	3	4	4	3	3	3	3	4	3	
285	4	4	4	3	4	4	2	4	4	
286	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
287	3	4	4	3	4	4	3	4	4	
288	2	3	3	2	3	3	2	3	3	
289	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
290	3	4	4	3	4	4	2	4	4	
291	4	4	3	3	3	3	3	3	4	
292	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
293	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
294	3	3	3	2	2	4	2	3	3	
295	3	4	4	2	3	3	2	3	3	
296	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
297	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
298	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
299	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
300	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
301	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
302	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
303	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
304	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
305	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
306	3	4	3	3	3	3	3	3	4	
307	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
308	3	4	4	3	4	4	3	4	4	
309	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
310	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
311	4	3	4	3	4	4	3	3	3	
312	4	3	3	2	3	3	2	3	3	
313	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
314	3	4	3	2	3	3	3	3	3	
315	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
316	3	3	3	2	3	3	2	2	3	
317	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
318	3	3	3	2	2	2	3	2	3	
319	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
320	3	3	4	2	3	2	3	4	3	
321	4	4	4	3	4	4	3	3	3	
322	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
323	3	3	2	2	3	3	2	3	3	
324	3	3	3	2	3	4	2	4	3	
325	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
326	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
327	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
328	3	3	3	2	4	3	2	3	3	
329	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
330	3	4	3	2	3	3	2	3	3	
331	3	4	3	2	3	3	3	3	3	
332	3	3	4	3	3	3	3	3	3	

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN (TAHUN 2023) Triwulan IV									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
333	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
334	3	2	3	2	3	3	2	3	3	
335	4	3	3	2	3	3	3	3	3	
336	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
337	3	3	3	2	2	2	2	2	3	
338	3	3	4	2	3	4	3	3	3	
339	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
340	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
341	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
342	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
343	4	4	4	3	4	4	3	3	3	
344	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
345	3	3	3	2	3	3	3	4	3	
346	3	3	4	2	3	3	3	4	3	
347	3	3	3	2	3	2	3	3	3	
348	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
349	4	4	4	2	4	4	3	4	4	
350	3	3	3	2	3	3	3	4	3	
351	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
352	4	4	4	2	4	4	3	4	4	
353	4	4	4	2	4	4	3	4	4	
354	3	3	3	2	2	3	3	2	2	
355	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
356	3	3	3	2	3	3	3	2	3	
357	3	3	3	2	3	3	3	2	2	
358	4	4	4	3	3	3	2	4	3	
359	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
360	3	3	3	2	3	4	2	3	3	
361	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
362	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
363	3	3	2	2	3	2	2	3	3	
364	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
365	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
366	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
367	4	3	3	3	4	4	3	2	4	
368	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
369	3	4	3	2	3	3	2	3	3	
370	3	4	4	2	3	4	2	3	3	
371	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
372	4	4	4	2	4	4	3	3	4	
373	3	3	3	2	3	3	2	3	3	
374	3	3	3	2	3	4	3	3	3	
375	3	3	4	2	3	4	3	4	3	
376	3	4	3	2	3	3	3	4	3	
377	4	4	4	3	4	4	2	3	4	
378	3	4	4	3	3	4	3	3	3	
379	3	3	3	2	3	3	3	4	2	
380	4	4	4	3	4	4	3	3	4	
381	3	4	3	3	3	3	3	3	4	
382	4	4	4	3	4	4	3	4	4	

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN (TAHUN 2023) Triwulan IV									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
383	3	3	3	2	3	3	3	3	2	
384	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
Total Nilai Unsur	1286	1303	1300	1017	1284	1287	1038	1252	1269	
NRR Per Unsur	3,349	3,393	3,385	2,648	3,344	3,352	2,703	3,260	3,305	28,740
NRR Tertimbang	0,372	0,377	0,376	0,294	0,371	0,372	0,300	0,362	0,367	3,190
Nilai SKM Bappeda per 31 Desember 2023										79,75



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123,
Telp 0541-742283